

Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2024

*Mewujudkan Sertifikasi Kompetensi Kerja
yang Kredibel & Berdaya Saing Global*



Laporan Kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2024
Mewujudkan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Kredibel & Berdaya Saing Global
©2025 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pengarah : Syamsi Hari, S.E., M.M.
drg. Ulfah Mashfufah, M.K.M.

Penyelia : Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M.
Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I.
Miftakul Azis, M.H.
Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A
Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si.
Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M.

Penyusun : Silvia Wahyuni Harahap, S.Sos., M.M.
Desy Darmayani, S.Kom.
Febie Dwikha Permatasari, S.P.
Zigit Maha Putra, S.Kom.
Riska Bahra, S.Kom.
Syamsuddin, S.Kom.
Amir Hamzah, A.Md.

Editor : Rafli Syahrizal

Desainer : Rafli Syahrizal

Cetakan I, Maret 2025

viii + 82 hlm.; 21 x 29,7 cm

Font yang dipakai: EB Garamond, TT Ramillas, Sukar, dan Helvetica.

Diterbitkan oleh

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Jl. Letjen MT Haryono Kav. 52,

Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 13630

Telepon: 021-26966525

E-mail: admin@bnsf.go.id

Website: bnsf.go.id



Kata Pengantar

Dalam rangka menyambut arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia periode 2024—2029, tahun 2024 menjadi titik penting bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia. BNSP berkomitmen mengembangkan sistem sertifikasi yang kredibel, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global. Penguatan sistem ini bertujuan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang diakui, dapat diandalkan, dan mampu berkompetisi di pasar global. Hal ini juga sejalan dengan misi dalam Asta Cita, yaitu peningkatan kualitas SDM, penguatan industri kreatif dan kewirausahaan, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang bersertifikasi.

Seiring dengan itu, BNSP turut mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang memprioritaskan pengembangan SDM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BNSP telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain melalui peningkatan jumlah asesi tersertifikasi, peningkatan LSP terlisensi pada sektor strategis, penguatan standar berbasis kebutuhan industri, perluasan kerja sama dengan *stakeholder* dalam dan luar negeri, serta digitalisasi layanan sertifikasi.

Kami optimis melalui harmonisasi standar nasional dengan standar internasional, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan, BNSP dapat terus berperan aktif dalam mewujudkan SDM Indonesia yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja Indonesia, BNSP berkomitmen untuk terus mendukung visi besar pemerintahan 2024—2029, demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem sertifikasi, yakni asosiasi profesi, lembaga pelatihan, institusi pendidikan, dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang telah dengan penuh dedikasi melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja selama tahun 2024. Semangat dan komitmen dari berbagai pihak ini menjadi pendorong dalam peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut dan semakin kuat pada tahun-tahun mendatang sehingga sistem sertifikasi kompetensi kerja semakin berkualitas dan terpercaya.



Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai langkah-langkah BNSP dalam mewujudkan sertifikasi kompetensi kerja yang kredibel dan berdaya saing global.

Jakarta, Februari 2025

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Syamsi Hari, S.E., M.M.



Ringkasan Eksekutif

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memiliki peran strategis dalam menjamin mutu sertifikasi kompetensi kerja nasional. Dengan mandat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, lembaga ini melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja melalui LSP yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

Sepanjang tahun 2024 BNSP mencatat berbagai capaian penting dalam upaya memperkuat sistem sertifikasi kompetensi yang kredibel dan berdaya saing global. Seluruh kebijakan dan program yang dijalankan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan industri, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital. Jumlah lembaga sertifikasi profesi (LSP) terlisensi pada tahun ini naik secara positif. Tercatat 2.339 LSP telah memperoleh lisensi, terdiri atas 1.691 LSP P1, 129 LSP P2, dan 519 LSP P3. Naik 4,19% dari tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin banyak lembaga yang terlibat dalam mendorong tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor strategis, untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standar industri.

Seiring dengan bertambahnya jumlah LSP, BNSP juga memperkuat pengawasan guna menjaga kualitas dan kredibilitas sistem sertifikasi. Berbagai langkah dilakukan, seperti verifikasi calon LSP (CLSP), asesmen penuh (*full assessment*), penyaksian uji (*witness*), dan surveilans untuk memastikan kepatuhan setiap LSP agar beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam proses pengawasan ini, ditemukan beberapa pelanggaran administratif maupun teknis yang berpotensi mengganggu sistem sertifikasi. Karena itu, pada tahun 2024, tujuh LSP dikenai sanksi pembekuan lisensi sebagai bentuk penegakkan standar dan komitmen terhadap kualitas sertifikasi di Indonesia.

Kemajuan juga terlihat pada sertifikasi kompetensi, asesi tersertifikasi mencapai 1.374.174 orang pada 2024, naik 11,55% dari tahun 2023, dengan total keseluruhan asesi tersertifikasi hingga Desember 2024 mencapai 9.809.813 asesi. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan proses standardisasi semakin matang. Kemudian, Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) mencapai 2.757 paket yang disalurkan kepada 379 LSP. Kualitas asesmen terus diperbaiki melalui berbagai pelatihan, antara lain pelatihan asesor kompetensi, RCC asesor kompetensi, dan *workshop* master asesor dengan tujuan menjaga profesionalisme tenaga asesor dalam melakukan sertifikasi.

BNSP juga turut memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian, asosiasi industri, dan mitra internasional. Kesepakatan strategis telah dijalin dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian, dengan beberapa lembaga internasional, seperti Japan International Human Capital Development Organization (JIHDO) dan Tokyo Technical College. Selain itu, perluasan pengakuan sertifikasi kompetensi secara global terus dilakukan melalui kerja sama dengan Taiwan, Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang. Langkah itu, membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Pengembangan sistem juga berlanjut di bidang data dan informasi, dengan percepatan digitalisasi layanan sertifikasi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup integrasi sistem informasi BNSP dengan LSP dan instansi terkait, pengembangan sertifikat elektronik, dan optimalisasi promosi sertifikasi kompetensi melalui berbagai platform digital.

Peningkatan efektivitas organisasi turut menjadi fokus bagian umum, dengan berbagai upaya dalam memperbaiki tata kelola internal. Evaluasi kinerja LSP dilakukan secara berkala guna memastikan standar mutu tetap terjaga. Sementara itu, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BNSP terus diupayakan melalui penyederhanaan proses, peningkatan responsibilitas, serta optimalisasi infrastruktur layanan agar lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, tantangan ke depan menjadi perhatian BNSP, terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi, perubahan kebutuhan industri, dan harmonisasi standar sertifikasi dengan pasar global. Transformasi digital yang semakin cepat menuntut integrasi sistem sertifikasi yang lebih adaptif dan *real-time*. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja tersertifikasi dengan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Karena itu, rekomendasi strategis yang dapat diambil, antara lain mempercepat digitalisasi proses sertifikasi secara menyeluruh, memperkuat kerja sama dengan sektor industri untuk memastikan keselarasan standar kompetensi dengan kebutuhan pasar, serta meningkatkan peran LSP dalam memperluas cakupan sertifikasi di daerah dan sektor-sektor yang masih kurang terjangkau.

Seluruh pencapaian ini mencerminkan komitmen BNSP dalam membangun sistem sertifikasi yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Namun, BNSP menyadari masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti aksesibilitas sertifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, pengawasan LSP, dan efisiensi prosedur sertifikasi. Melalui peningkatan kapasitas LSP, kerja sama global, digitalisasi, dan penguatan tata kelola, BNSP terus memperbaiki sistem sertifikasi agar lebih inklusif, kredibel, dan relevan dengan industri sehingga tenaga kerja Indonesia siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.



Daftar Isi

Kata Pengantar | iv

Ringkasan Eksekutif | v

Daftar Isi | vii



Bab 1 Pendahuluan | 1



Bab 2 Profil BNSP | 3

- A. Sekilas tentang BNSP | 4
- B. Visi dan Misi BNSP | 6
- C. Struktur Organisasi BNSP | 6
- D. Program Kerja BNSP | 11



Bab 3 Capaian Kinerja | 23

- A. Sertifikasi Kompetensi | 18
- B. Penguatan LSP dan Skema Sertifikasi | 34
- C. Kolaborasi Nasional dan Internasional | 49
- D. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi | 63
- E. Evaluasi dan Pengawasan LSP | 68



Bab 4 Analisis Tantangan dan Solusi | 79

- A. Tantangan dalam Pelaksanaan Sertifikasi | 76
- B. Rekomendasi Peningkatan Mutu | 77



Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis | 83







Bab 1 Pendahuluan



Tahun 2024 menjadi titik penting bagi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam rangka menyambut arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan pemerintahan RI periode 2024—2029. Penguatan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi agenda prioritas dari pemerintahan yang baru dalam kerangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan misi yang tertuang dalam Asta Cita, yakni peningkatan kualitas SDM (Asta Cita 4), penguatan ekosistem industri kreatif dan kewirausahaan (Asta Cita 3), serta pemerataan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang bersertifikasi (Asta Cita 4).

Pemerintah juga telah menyusun strategi jangka panjang melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 yang menempatkan pengembangan SDM sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, penguatan tenaga kerja menjadi salah satu bagian integral dari Trisula Pembangunan yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BNSP memperkuat langkah-langkah strategis untuk menghadapi transisi pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan sertifikasi kompetensi selaras dengan arah pembangunan nasional. Berbagai program prioritas telah direncanakan dan dijalankan, meliputi peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi, penguatan standar berbasis kebutuhan industri, digitalisasi layanan sertifikasi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga sertifikasi profesi (LSP). Kemudian, harmonisasi standar nasional dengan standar internasional terus diperluas, membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global.

Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, serta lembaga pendidikan dan pelatihan, BNSP optimis dapat terus mendorong sistem sertifikasi yang lebih kredibel, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi besar pemerintahan 2024—2029.



Bab 2

Profil BNSP





A. Sekilas Tentang BNSP

Tugas

Apa yang kami lakukan?

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja melalui LSP yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

Fungsi

Bagaimana kami melakukannya?

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BNSP melakukan fungsi

1. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
2. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
4. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
5. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antarlembaga, baik nasional maupun internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
6. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Hasil

Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan BNSP meliputi

1. peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi;
2. peningkatan jumlah LSP terlisensi;
3. peningkatan jumlah SDM pada ekosistem sertifikasi;
4. keselarasan yang lebih baik antara sertifikasi dengan kebutuhan industri, memastikan bahwa sertifikasi memenuhi perkembangan terkini; dan
5. penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan kompetensi.

Manfaat

Untuk pemangku
kepentingan

Manfaat dari sertifikasi kompetensi

1. bagi individu, sertifikasi memberikan pengakuan formal atas keterampilan dan membuka peluang di pasar kerja;
2. bagi *stakeholder*, sertifikasi memastikan tenaga kerja dengan kompetensi yang terverifikasi dan meningkatkan kualitas layanan serta daya saing; dan
3. bagi negara, sertifikasi berkontribusi pada tenaga kerja terampil yang siap menghadapi tantangan global.

Prinsip

Asas berpikir
dan bertindak

BNSP menjalankan prinsip-prinsip

1. penjaminan mutu (standardisasi);
2. transparansi dan akuntabilitas;
3. kolaborasi; dan
4. perbaikan berkelanjutan (inovasi).

B. Visi dan Misi BNSP



Visi

Mewujudkan lembaga otoritas sertifikasi kompetensi yang diakui di tingkat nasional dan internasional sebagai penjamin mutu SDM unggul secara merata di seluruh sektor menuju Indonesia Emas 2045.



Misi

1. Penguatan kelembagaan dan organisasi BNSP
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM dengan Standar Kompetensi Kerja
3. Peningkatan akses dan kesempatan sertifikasi
4. Pengakuan dan kerja sama internasional
5. Penguatan kebijakan dan regulasi
6. Promosi dan advokasi

C. Struktur Organisasi BNSP

Saat ini, BNSP dikelola oleh tujuh orang Anggota. Struktur organisasi BNSP terdiri atas seorang Ketua yang juga merangkap sebagai Anggota, Wakil Ketua yang merangkap sebagai Anggota, dan lima Anggota lainnya yang bertanggung jawab atas bidang tertentu.

Berikut ini adalah susunan organisasi BNSP periode 2023–2028.

Jabatan	Nama
Ketua	Syamsi Hari, S.E., M.M.
Wakil Ketua Selaku Koordinator Bidang	drg. Ulfah Mashfufah, M.K.M.
Anggota Selaku Bidang Lisensi	Adi Mahfudz Wuhadji, M.B.A.
Anggota Selaku Bidang Sertifikasi	Miftakul Azis, M.H.
Anggota Selaku Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerja Sama, Hukum, dan Umum	Prof. Dr. Amilin, S.E., M.Si.
Anggota Selaku Bidang Data dan Informasi	Nurwijoyo Satrio Aji Martono, S.H.I.
Anggota Selaku Bidang Pengembangan SDM	Muhammad Nur Hayid, S.Th.I., M.M.

Struktur organisasi Sekretariat BNSP periode 2024 disusun untuk mendukung tugas dan fungsi yang telah diuraikan. Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, struktur ini mencakup berbagai bagian yang masing-masing bertanggung jawab atas fungsi-fungsi spesifik, antara lain Bagian Umum, Bidang Hukum dan Kerja Sama, Bidang Data dan Informasi, Bidang Lisensi, dan Bidang Sertifikasi. Dengan struktur dan fungsi yang telah ditetapkan, Sekretariat BNSP diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mendukung BNSP mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas dan kredibilitas sertifikasi profesi di Indonesia (nasional) maupun global (internasional).

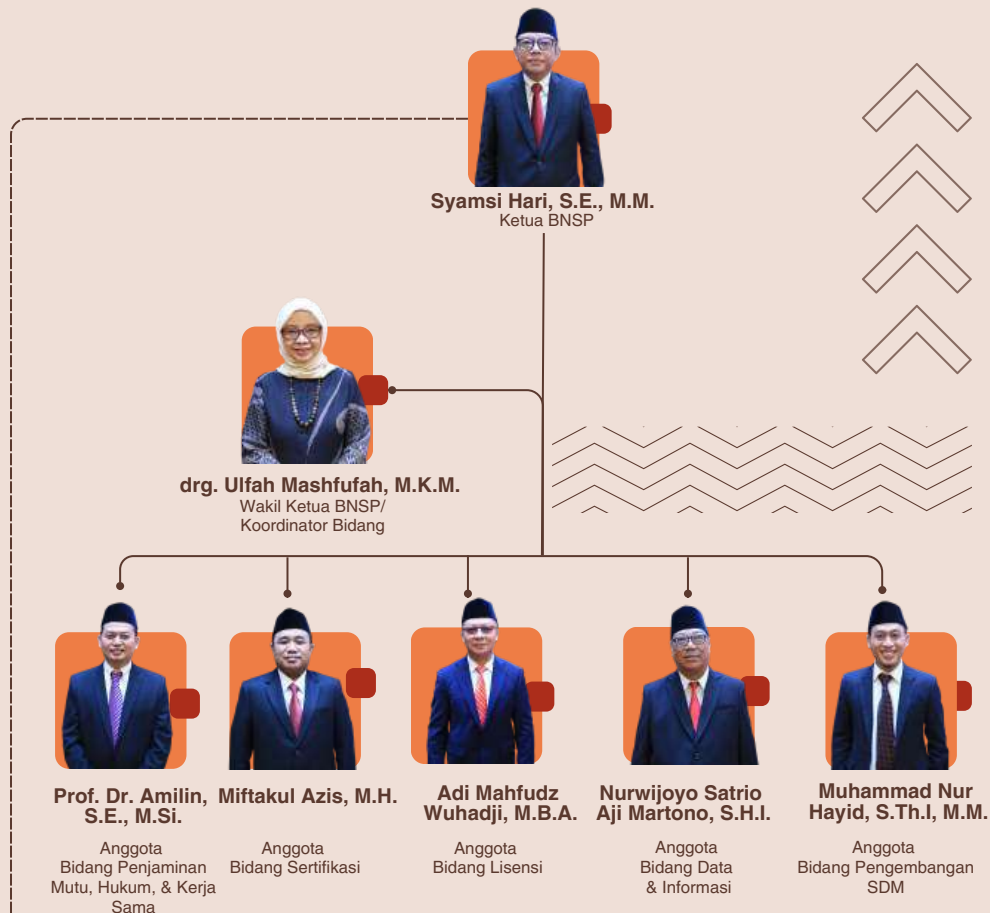
Berikut ini adalah susunan sekretariat BNSP periode 2024.

Jabatan	Nama
Kepala Sekretariat	Fauziah, SE, M.Si
Kepala Bagian Umum	1. Moh. Saeful Hasan, S.T, M.T. (Januari s.d. September 2024) 2. Yudi Hermawan, S.Ant., M.Si. (September 2024 s.d. sekarang)
Koordinator Bidang Hukum dan Kerja Sama	1. Rinny Syafriadi, S.Sos, M.Si (Januari s.d. September 2024) 2. Budhi Hidayat Laksana, S.H., M.Hum. (September s.d. Oktober 2024)
Koordinator Bidang Lisensi	Ade Syaekudin, S.H., M.M.
Koordinator Bidang Sertifikasi Kompetensi	1. Elviandi R.S., S.E, M.Hum, Ph.D. (Januari s.d. September 2024) 2. Wahyu Yudo Wibisono, S.T., M.Sc. (September 2024 s.d. sekarang)
Koordinator Bidang Data dan Informasi	Silvia Wahyuni Harahap, S.Sos., M.M.

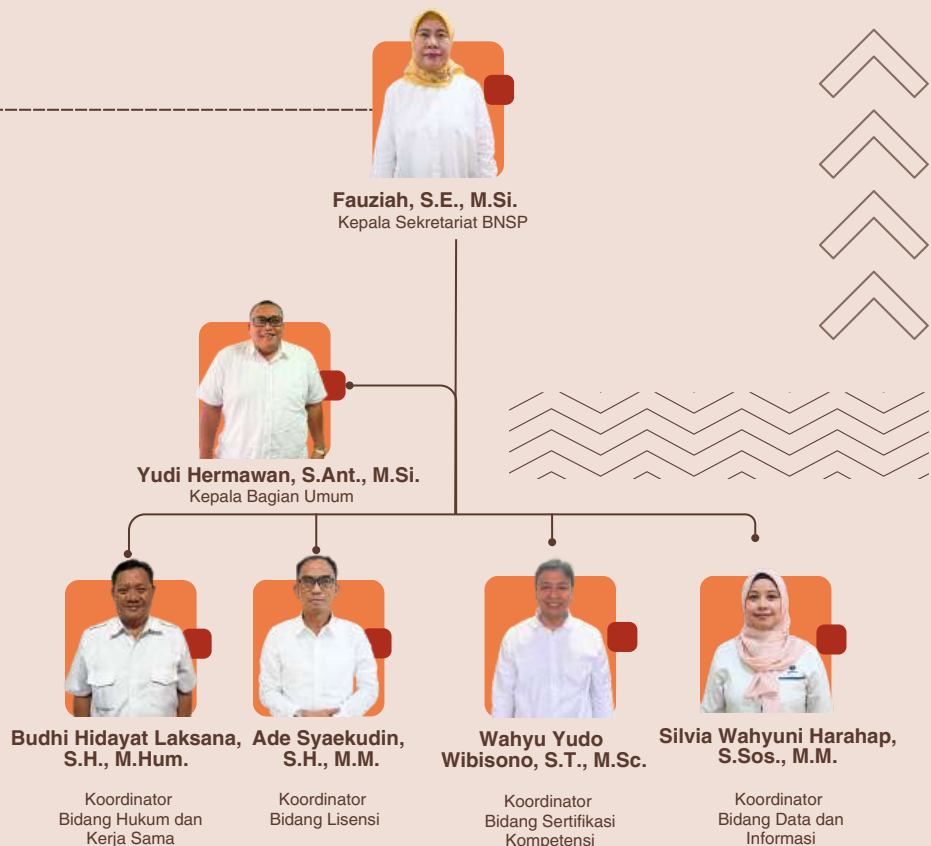


Struktur BNSP

Periode 2023—2028



Struktur Sekretariat BNSP





Gambar 1 Anggota BNSP Periode 2023—2028

D. Program Kerja BNSP

Program kerja BNSP tahun 2024 disusun dengan mengacu pada fungsi BNSP sebagai berikut:

- 1.pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
- 2.pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
- 3.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
- 4.pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
- 5.pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antarlembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
- 6.pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Program prioritas ini bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja, memastikan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, dan memperluas akses sertifikasi. BNSP berupaya membangun ekosistem sertifikasi yang kredibel melalui sinergi dengan lembaga pelatihan, asosiasi profesi, dan industri.

Berikut ini perincian program prioritas BNSP tahun 2024.

Tabel 1 Pelaksanaan dan Pengembangan Sertifikat Kompetensi Kerja

No.	Program Kerja	Hasil
1	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Kerja Sasaran dan indikator: Terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja di setiap sektor dengan perincian jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di semua sektor.	1.374.174 asesi
2	Pengembangan Sumber Daya Sertifikasi Kompetensi Kerja Sasaran dan indikator: Terlaksananya pengembangan sumber daya sertifikasi kompetensi kerja dengan perincian	

	a. LSP: 1) jumlah orang yang dilatih penyusunan dokumen LSP; 2) jumlah LSP terlisensi (baru); 3) jumlah LSP yang diperpanjang lisensinya; 4) jumlah LSP yang diberikan penambahan dan/atau penyesuaian ruang lingkup lisensi. b. Skema Sertifikasi: 1) jumlah skema sertifikasi yang terverifikasi di seluruh sektor. c. SDM Sertifikasi: 1) jumlah Asesor Kompetensi baru; 2) jumlah Asesor Kompetensi yang diperpanjang sertifikat kompetensinya; 3) jumlah Calon Master Asesor yang dilatih; 4) reviu dan penyusunan modul Master Asesor Kompetensi; 5) jumlah Calon Master Asesor yang mengikuti program magang; 6) jumlah Calon Master Asesor yang disertifikasi; dan 7) jumlah Master Asesor yang diperpanjang sertifikat kompetensinya. d. SDM Lisensi: 1) jumlah Calon Asesor Lisensi yang dilatih; 2) jumlah Asesor Lisensi Muda baru; dan 3) jumlah penyusun skema yang dilatih.	140 orang 166 LSP 305 LSP 684 LSP 4.042 skema terverifikasi 11.503 Asesor 10.086 Asesor 20 CMA 1 dokumen 39 CMA 39 CMA 91 Master Asesor 20 CAL 19 Asesor 140 orang
3	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Melalui Sertifikasi Jarak Jauh dan Nirkertas (<i>Paperless</i>) Sasaran dan indikator: Meningkatnya pelayanan permohonan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh dan nirkertas (<i>paperless</i>) dengan perincian a. jumlah LSP yang mendapatkan persetujuan pelaksanaan sertifikasi jarak jauh; b. jumlah LSP yang mendapatkan persetujuan penggunaan <i>paperless</i>; dan c. jumlah skema sertifikasi yang dapat dilayani sertifikasi jarak jauh.	52 LSP 11 LSP 366 skema

4	Peningkatan Kualitas Asesmen Kompetensi Sasaran dan indikator: Meningkatkan kualitas asesmen kompetensi dengan perincian jumlah LSP yang telah menerapkan MUK versi 2023.	1.034 LSP
---	--	-----------

Tabel 2 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

No.	Program Kerja	Hasil
1	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Sasaran dan indikator: Meningkatnya penyelenggaraan penjaminan mutu bagi peserta didik dan peserta latih melalui sertifikasi kompetensi dengan perincian a. jumlah LSP terlisensi pada lembaga pendidikan vokasi; b. jumlah pengelola LSP PVPV yang ditingkatkan kompetensinya.	19 SMK dan 26 PT 39 SMK dan 26 PT
2	Peningkatan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Tingkat Nasional dan Internasional Sasaran dan indikator: Meningkatnya peran BNSP dalam Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan perincian a. MoU BNSP dengan Kadin; b. MoU BNSP dengan industri; dan c. jumlah industri yang mendapatkan sosialisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.	1 MoU 1 MoU 1 industri

Tabel 3 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional

No.	Program Kerja	Hasil
1	Peningkatan Tata Kelola LSP Sasaran dan indikator: Meningkatnya tata kelola LSP dengan perincian jumlah koordinasi berdasarkan instansi pembina sektor, LSP, dan pendiri LSP.	89 koordinasi
2	Pengendalian Lisensi Sasaran dan indikator: Lisensi LSP yang terkendali dengan perincian a. jumlah LSP yang disurveilans; b. tindak lanjut hasil surveilans; dan c. tindak lanjut temuan potensi dan/atau praktik ketidaksesuaian penggunaan lisensi LSP yang ditindaklanjuti.	100 LSP 4 LSP 4 LSP
3	Pengembangan Sistem Pembinaan dan Pengawasan Sasaran dan indikator: Sistem pembinaan dan pengawasan yang dikembangkan dengan perincian tersedianya hasil reviu instrumen surveilans.	1 dokumen
4	Penerapan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Manajemen Mutu BNSP Sasaran dan indikator: Terlaksananya penerapan sistem penjaminan mutu BNSP dan tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu dengan perincian a. indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BNSP meningkat; b. indeks penilaian Ombudsman meningkat; dan c. indeks SPI meningkat.	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

No.	Program Kerja	Hasil
5	Peningkatan Tata Kelola Manajemen SDM Lisensi dan Sertifikasi Sasaran dan indikator: Meningkatnya tata kelola manajemen SDM lisensi dan sertifikasi dengan perincian a. terwujudnya manajemen penugasan master asesor dan calon master asesor; b. tersedianya sistem pengembangan master asesor; dan c. terlaksananya pembinaan dan evaluasi kinerja master asesor dan calon master asesor.	1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan

Tabel 4 Pengembangan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dan Internasional

No.	Program Kerja	Hasil
1	Pengembangan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Luar Negeri Sasaran dan indikator: Tercapainya pengakuan sertifikasi kompetensi kerja di Jepang dan Korea Selatan dengan perincian a. jumlah tenaga kerja bidang <i>welder</i> bersertifikat kompetensi yang ditempatkan di Korea Selatan b. sertifikasi profesi bidang halal di Taiwan.	1.247 orang 1 kegiatan
2	Peningkatan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Semua Sektor Sasaran dan indikator: Meningkatnya pengakuan sertifikasi pada bidang ketenagakerjaan dengan perincian meningkatnya pengakuan sertifikasi di pasar kerja.	1 kegiatan

Tabel 5 Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama Antarlembaga, Baik Nasional dan Internasional di Bidang Sertifikasi Profesi

No.	Program Kerja	Hasil
1	Berperan Aktif dalam Pengembangan MRA Lintas K/L Sasaran dan indikator: Terlaksananya koordinasi dalam pengembangan MRA dengan perincian berperan aktif dalam IK-CEPA, IMT-GT, MEA, tenaga kerja sektor maritim, dan <i>engineering</i>.	1 dokumen

Tabel 6 Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Terintegrasi

No.	Program Kerja	Hasil
1	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik BNSP yang Terintegrasi Sasaran dan indikator: Terwujudnya sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan perincian a. intergrasi sistem BNSP dengan Pusdatik, KP2MI/BP2MI, dan PUPR; b. integrasi sistem BNSP dengan LSP. Kemudian, optimalisasi sistem data dan informasi (aplikasi baru/New Sisfo) dengan perincian a. semua aplikasi sistem informasi BNSP diterapkan; b. peningkatan promosi dan <i>branding</i> BNSP di seluruh sektor dan K/L melalui promosi melalui media <i>online</i>; dan c. tersedianya materi promosi BNSP.	3 K/L 34 LSP 15 aplikasi 168 konten 2 dokumen
2	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja LSP Sasaran dan indikator: Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan kinerja LSP dengan perincian tersedianya sistem penerbitan sertifikat elektronik.	1 aplikasi



Bab 3

Capaian Kinerja



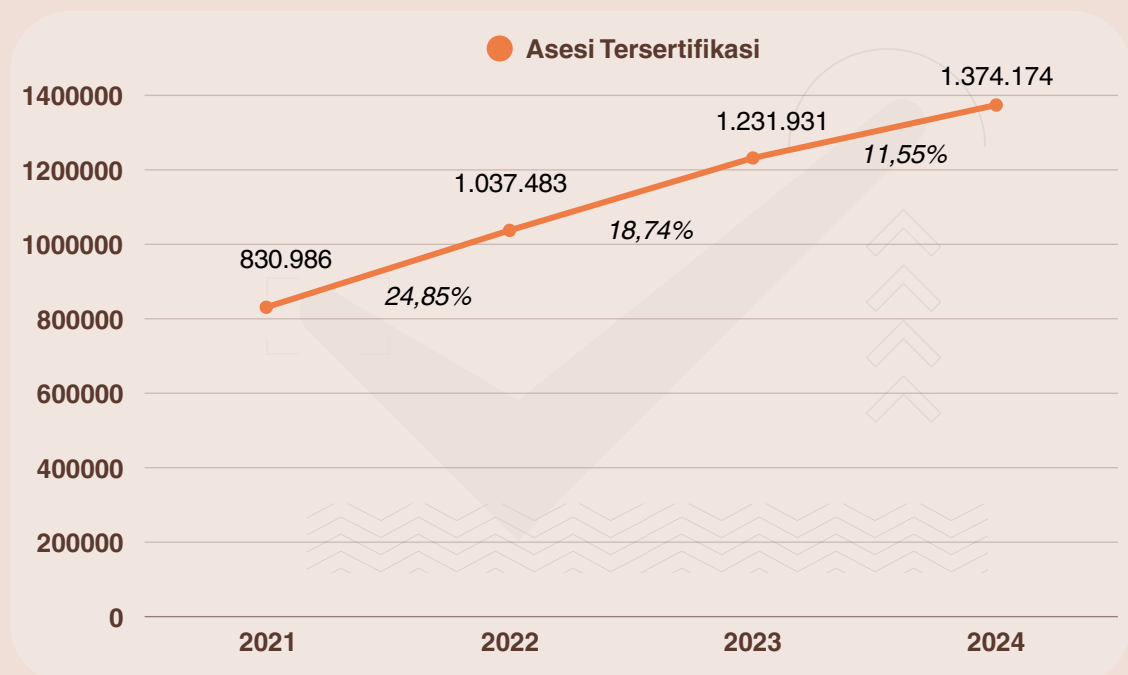


Bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepanjang tahun 2024. Kinerja yang dicapai oleh masing-masing bidang, yaitu Bidang Lisensi, Bidang Sertifikasi, Bidang Hukum dan Kerja Sama, Bidang Data dan Informasi, serta Bagian Umum, menjadi landasan penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi di Indonesia. Setiap bidang berperan strategis dalam mengembangkan kebijakan, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat regulasi, dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan sinergi antarbidang, BNSP terus mengoptimalkan sistem sertifikasi guna mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia serta mendorong pengakuan kompetensi yang lebih luas di pasar kerja global.

A. Sertifikasi Kompetensi Kerja

1. Perkembangan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pada tahun 2024, jumlah asesi tersertifikasi mencapai 1.374.174, melanjutkan tren pertumbuhan positif dari tahun-tahun sebelumnya. Data BNSP menunjukkan lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan kenaikan 24,85%, diikuti tahun 2023 dengan 18,74%. Pada 2024, meskipun pertumbuhan tercatat lebih rendah menjadi 11,55%, hal ini justru menunjukkan stabilitas dan keberhasilan implementasi proses standardisasi yang semakin kuat dalam pengembangan sistem sertifikasi.



Secara keseluruhan, sejak tahun 2006 hingga 2024, jumlah asesi tersertifikasi telah mencapai 9.809.813. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan standar kompetensi tenaga kerja, seiring dengan semakin luasnya cakupan sertifikasi di berbagai sektor industri.

Pengajuan blangko sertifikat fisik menjadi indikator penting dalam mengukur volume sertifikasi yang dilakukan oleh LSP, sekaligus menunjukkan seberapa besar jumlah asesi yang telah dinyatakan kompeten. Sepanjang tahun 2024, 10 LSP teratas dalam kategori ini adalah sebagai berikut.

No.	Nama LSP
1	LSP Teknologi Digital
2	LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
3	LSP PPSDM Migas
4	LSP Pekerja Domestik (PD) Citra Indonesia
5	LSP PAMA
6	LSP Perbankan
7	LSP K3 Nasional
8	LSP Asnakes Indonesia
9	LSP Kelautan dan Perikanan
10	LSP Pekerja Domestik (PD) LUK Perdana

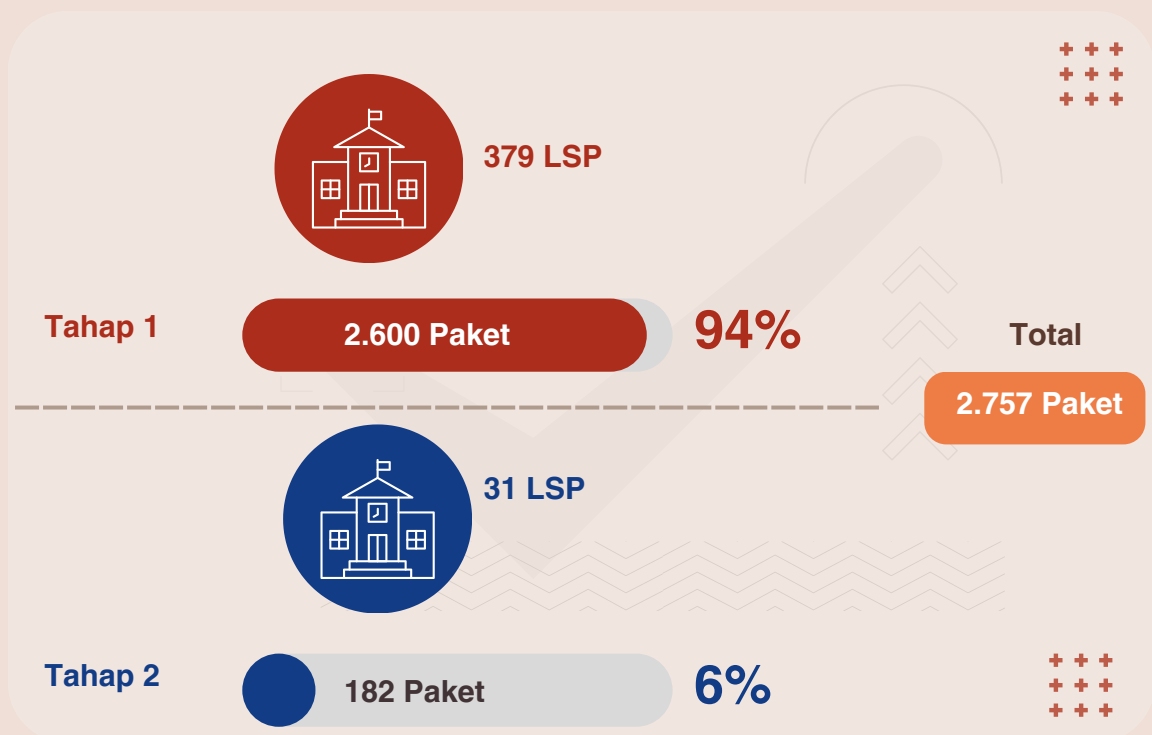
Sementara itu, pengajuan e-sertifikat menandakan adopsi terhadap digitalisasi layanan sertifikasi yang semakin meningkat. 10 LSP dengan pengajuan blangko e-sertifikat terbanyak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Nama LSP
1	LSP Astekindo Konstruksi Mandiri
2	LSP Tenaga Konstruksi Nasional
3	LSP Ataki Konstruksi Indonesia
4	LSP Gatensi Karya Konstruksi
5	LSP Gataki Konstruksi Mandiri
6	LSP Bina Konstruksi Nusantara
7	LSP Petakindo Konstruksi Mandiri
8	LSP Keselamatan Kesehatan Kerja
9	LSP Kompetensi Konstruksi Mandiri
10	LSP Hatsindo Indonesia Teknik

Dominasi LSP dari sektor konstruksi mencerminkan kebutuhan sertifikasi yang tinggi dalam mendukung proyek pembangunan nasional dan infrastruktur. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor konstruksi telah bertransformasi ke arah sistem sertifikasi yang lebih modern dan efisien melalui e-sertifikat.

2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)

Sejak pertama kali diluncurkan hingga kini, kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) telah menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan proses sertifikasi kompetensi kerja setiap tahunnya. Program PSKK yang dilaksanakan BNSP, merupakan program yang didanai melalui anggaran negara, sebagai bentuk nyata upaya akselerasi tersedianya tenaga kerja yang tersertifikasi dengan memberdayakan LSP yang terlisensi BNSP.



Pemerintah mengalokasikan total 2.757 paket PSKK kepada 379 LSP. Program ini dibagi dalam dua tahap, dengan tahap pertama alokasi 2.600 paket untuk 348 LSP, kemudian tahap kedua sebanyak 182 paket untuk 31 LSP. Jangkaun kepesertaan yang mengikuti sertifikasi mencapai 55.140 asesi dengan perincian 1 paket kegiatan diikuti oleh 20 asesi dan diuji oleh 2 orang asesor.



Gambar 2 Sosialisasi PSKK

Berdasarkan proses pelaksanaannya, kegiatan PSKK diawali dengan sosialisasi secara luring pada tanggal 3–23 Maret 2024 di beberapa kota, yaitu Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Bekasi. Setelah tahap sosialisasi, LSP melakukan pengumpulan dan verifikasi proposal PSKK. Berdasarkan hasil verifikasi dan rapat pleno terkait penetapan paket PSKK, Komite Panitia Program PSKK kemudian menetapkan keputusan terkait pelaksanaan program ini.

Pelaksanaan PSKK dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, seluruh paket sertifikasi disalurkan kepada LSP. Kemudian, paket yang tidak terselesaikan oleh LSP pada tahap pertama akan kembali dibuka pada tahap kedua. Untuk memastikan kualitas proses uji dalam kegiatan PSKK, BNSP melakukan monitoring dalam dua tahap, yakni tahap persiapan/pelaksanaan dan tahap pelaporan. Secara keseluruhan, kegiatan PSKK tahun 2024 dilaksanakan dalam periode empat bulan, yaitu dari Mei hingga Agustus 2024.

Sebagai bagian dari proses pelaksanaan, dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) untuk PSKK tahun 2024. Penandatanganan diadakan di tiga kota, yaitu Bekasi pada 18 Mei 2024 di Hotel Aston, Surabaya pada 20 Mei 2024 di Harris Hotel & Convention Gubeng, dan Yogyakarta pada 22 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan BNSP, termasuk para Anggota dan jajaran Sekretariat BNSP, serta 356 LSP yang telah ditetapkan. Penandatanganan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi berjalan sesuai standar guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.



Gambar 3 Penandatanganan Swakelola PSKK

3. Pelatihan Asesor Kompetensi

Pelatihan asesor kompetensi merupakan program rutin yang difasilitasi oleh BNSP. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dua skema pembiayaan, yaitu melalui APBN dan pembiayaan mandiri. Skema pembiayaan mandiri memungkinkan LSP untuk mengadakan pelatihan secara independen, baik dengan subsidi maupun melalui mekanisme berbayar bagi calon asesor.

Pelatihan ini bertujuan mencetak asesor kompetensi yang terampil dan terlatih dalam melaksanakan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP. Selain itu, pelatihan ini juga untuk menyamakan pandangan dalam proses penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan menjalani evaluasi guna menentukan kelayakan mereka sebagai asesor kompetensi.



Gambar 4 Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi Mandiri

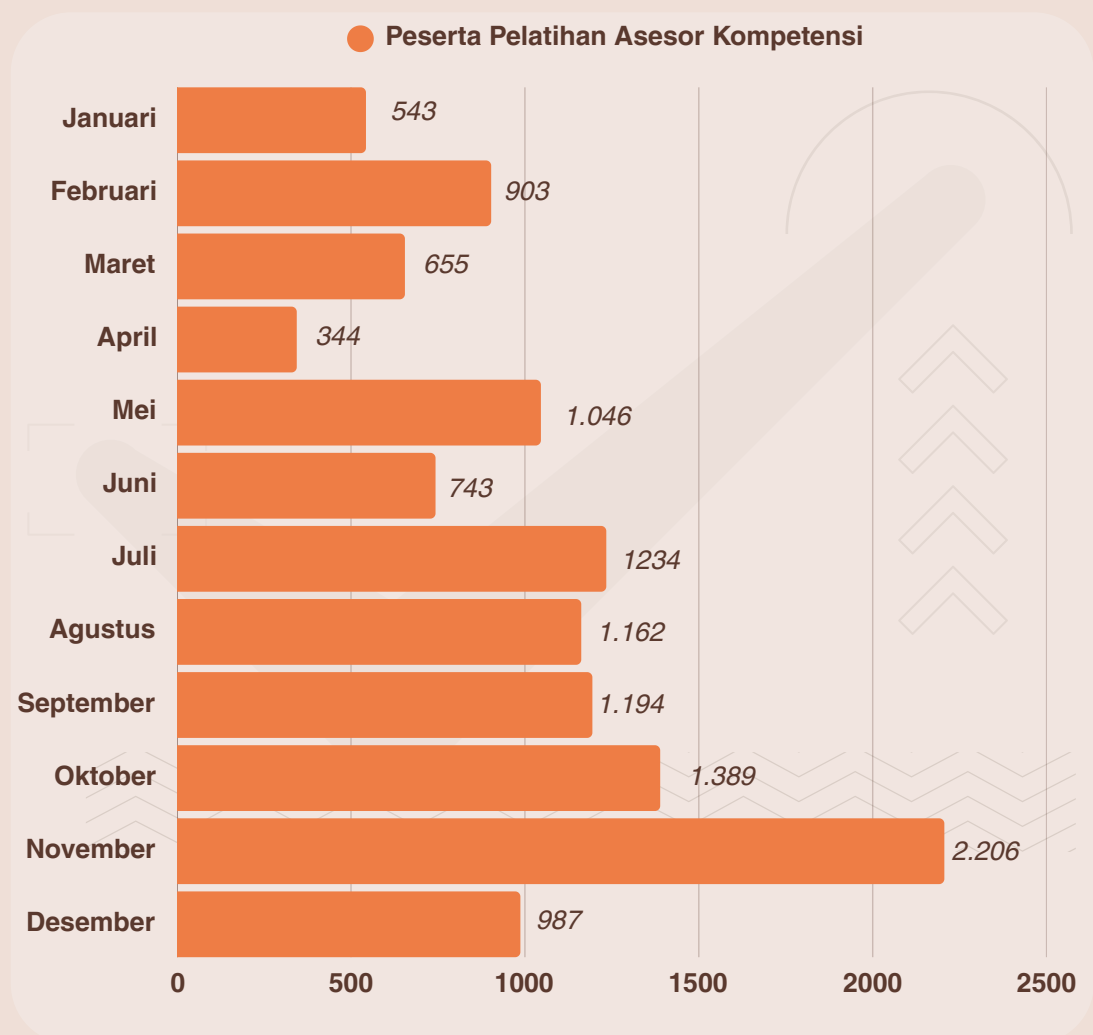
a. APBN Sekretariat BNSP

Pelatihan asesor kompetensi yang didukung oleh anggaran APBN Sekretariat BNSP telah dilaksanakan dalam 7 paket pelatihan dengan total 140 peserta. Dengan pendanaan dari APBN, peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa beban biaya sehingga memperluas akses dan meningkatkan jumlah asesor yang kompeten di berbagai sektor.

b. Pelatihan Mandiri (LSP)

Pelatihan asesor kompetensi diselenggarakan 421 LSP dan diikuti oleh 12.406 calon asesor kompetensi dengan skema pembiayaan mandiri, baik melalui biaya asesi maupun subsidi dari LSP. Partisipasi tertinggi tercatat pada November dengan 2.206 peserta, sedangkan April menjadi bulan dengan jumlah peserta paling sedikit, yaitu 344 orang.

Pelatihan ini untuk menambah jumlah asesor kompetensi sekaligus menstandarisasi kualitas calon asesor agar mampu melakukan asesmen secara profesional, objektif, dan berintegritas. Karena itu, dapat berkontribusi pada peningkatan mutu serta daya saing tenaga kerja di berbagai sektor.



4. *Recognition Current Competency (RCC)* Asesor Kompetensi

Sertifikat asesor kompetensi memiliki masa berlaku selama tiga tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua BNSP. Karena itu, asesor yang sertifikatnya telah kedaluwarsa wajib melakukan perpanjangan melalui kegiatan *Recognition of Current Competency (RCC)* atau resertifikasi. Program ini bertujuan memperbarui pengetahuan dan keterampilan asesor agar selaras dengan perkembangan kebijakan sertifikasi yang diterapkan oleh BNSP. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana menyamakan kembali persepsi dalam proses penilaian dan pelaksanaan uji kompetensi.



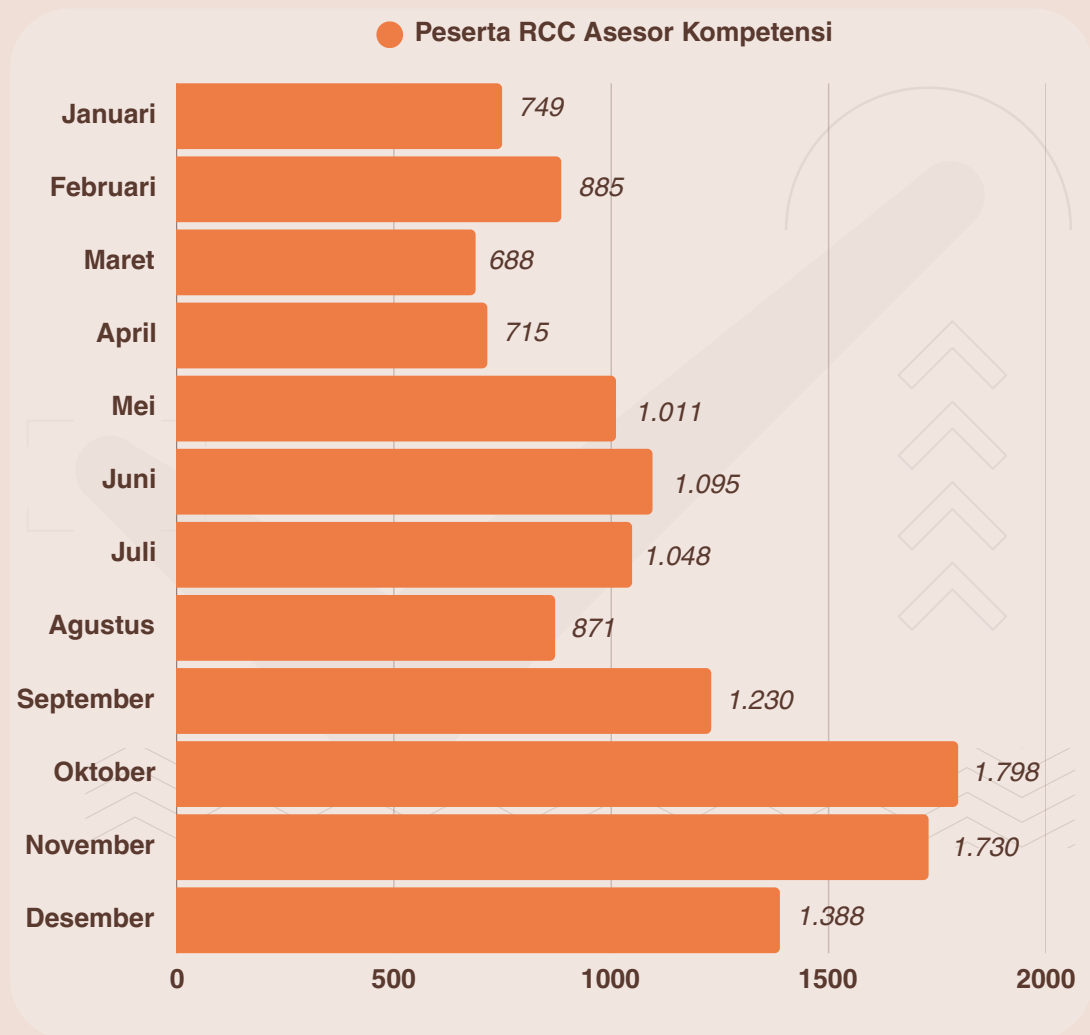
Gambar 5 Pelaksanaan RCC Asesor Kompetensi Mandiri

a. APBN Sekretariat BNSP

Kegiatan RCC yang menggunakan dana APBN Sekretariat BNSP dialokasikan untuk 9 paket bagi 180 peserta.

b. Pembiayaan Mandiri (LSP)

Sebanyak 464 LSP mengadakan RCC asesor kompetensi dengan pembiayaan mandiri, diikuti oleh 13.208 peserta. Jumlah peserta paling banyak tercatat pada Oktober dengan 1.798 orang, sedangkan terendah pada Januari dengan 749 orang.



5. Sertifikasi CMA dan *Recognition of Current Competency* (RCC) Master Asesor Kompetensi



Gambar 6 Sertifikasi CMA Tahun 2024

Calon master asesor (CMA) yang telah menyelesaikan magang dan memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi master asesor kompetensi berjumlah 39 orang. Dari 98 master asesor yang dijadwalkan mengikuti *Recognition of Current Competency* (RCC) master asesor kompetensi, 91 peserta lolos seleksi dan melanjutkan proses RCC.

Pelaksanaan sertifikasi calon master asesor kompetensi dan RCC master asesor kompetensi diselenggarakan pada 9–10 September 2024 di Gedung BNSP Jakarta. Dari hasil uji kompetensi, seluruh peserta RCC dinyatakan “kompeten”. Sementara itu, dari 39 orang yang mengikuti sertifikasi master asesor kompetensi, sebanyak 36 orang dinyatakan “kompeten”, sedangkan 3 orang lainnya dinyatakan “belum kompeten”. Hasil ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas master asesor kompetensi dan memperkuat sistem sertifikasi guna memastikan standar yang lebih baik di berbagai sektor industri.

6. *Workshop* Master Asesor Kompetensi

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme master asesor kompetensi, BNSP menyelenggarakan *Workshop* Master Asesor Kompetensi sebagai forum strategis untuk memperbarui wawasan, menyelaraskan standar asesmen, dan memperkuat integritas dalam menjalankan peran asesor. *Workshop* ini menjadi ajang diskusi dan pembelajaran bagi para master asesor kompetensi dalam menghadapi dinamika perkembangan kebijakan sertifikasi dan uji kompetensi.



Gambar 7 Lokakarya Master Asesor Kompetensi

Pada tanggal 30 Oktober 2024, *workshop* ini diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi, dengan dihadiri oleh 230 peserta yang terdiri atas 185 master asesor kompetensi serta 45 pegawai dan pejabat di lingkungan BNSP. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber berpengalaman, yaitu Asrizal Tatang, Dewi Eka Arini, dan Nurul Indah Susanti. Ketiga master asesor tersebut membawakan materi-materi terkait pengembangan dan pembaruan dalam sistem asesmen kompetensi.

Materi yang disampaikan dalam *workshop* ini meliputi *roadmap* pengembangan master asesor kompetensi, kode etik master asesor kompetensi, dan materi uji kompetensi (MUK) versi tahun 2023. Melalui kegiatan ini, para peserta semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas asesmen, menerapkan kode etik secara profesional, serta mengadaptasi pembaruan dalam materi uji kompetensi guna memastikan proses sertifikasi yang lebih akurat, kredibel, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

7. Sosialisasi MUK Versi Tahun 2023

BNSP menggelar Sosialisasi Penerapan Materi Uji Kompetensi (MUK) versi tahun 2023 pada 1 Februari 2024 di Gedung BNSP, dengan tujuan menyamakan persepsi serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada ekosistem sertifikasi kompetensi kerja. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari, dan dihadiri oleh para asesor lisensi BNSP, baik secara langsung maupun daring. Dalam sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai implementasi MUK versi tahun 2023, termasuk perubahan substansial yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta relevansi uji kompetensi di berbagai sektor industri.



Gambar 8 Sosialisasi Penerapan MUK Versi Tahun 2023

Materi uji kompetensi (MUK) merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan uji kompetensi, disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/atau standar khusus yang telah diverifikasi oleh BNSP. Dengan adanya sosialisasi ini, asesor dapat lebih siap dalam menerapkan standar terbaru dalam proses sertifikasi. Penerapan MUK yang sesuai standar akan berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan mutu tenaga kerja bersertifikasi di Indonesia sehingga lebih siap menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun internasional.

8. Data Master Asesor Kompetensi

Jumlah master asesor kompetensi pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total sebanyak 186 orang, naik dari 140 orang pada tahun 2023. Kenaikan ini mencapai 32,86%, menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas asesor kompetensi di berbagai sektor guna memastikan kualitas uji sertifikasi yang lebih optimal. Dengan bertambahnya jumlah master asesor, proses sertifikasi kompetensi dapat semakin efisien, kredibel, serta mampu menjangkau lebih banyak tenaga kerja yang membutuhkan pengakuan atas keterampilan dan keahliannya sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Berikut ini sebaran jumlah master asesor berdasarkan provinsi.

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	1	8	Jawa Timur	23
2	Bali	8	9	Kalimantan Barat	1
3	Banten	11	10	Kalimantan Selatan	2
4	DI Yogyakarta	6	11	Riau	3
5	DKI Jakarta	42	12	Sulawesi Selatan	8
6	Jawa Barat	55	13	Sumatra Barat	4
7	Jawa Tengah	20	Total		186



Peta Sebaran Master Asesor





Kompetensi Tahun 2024

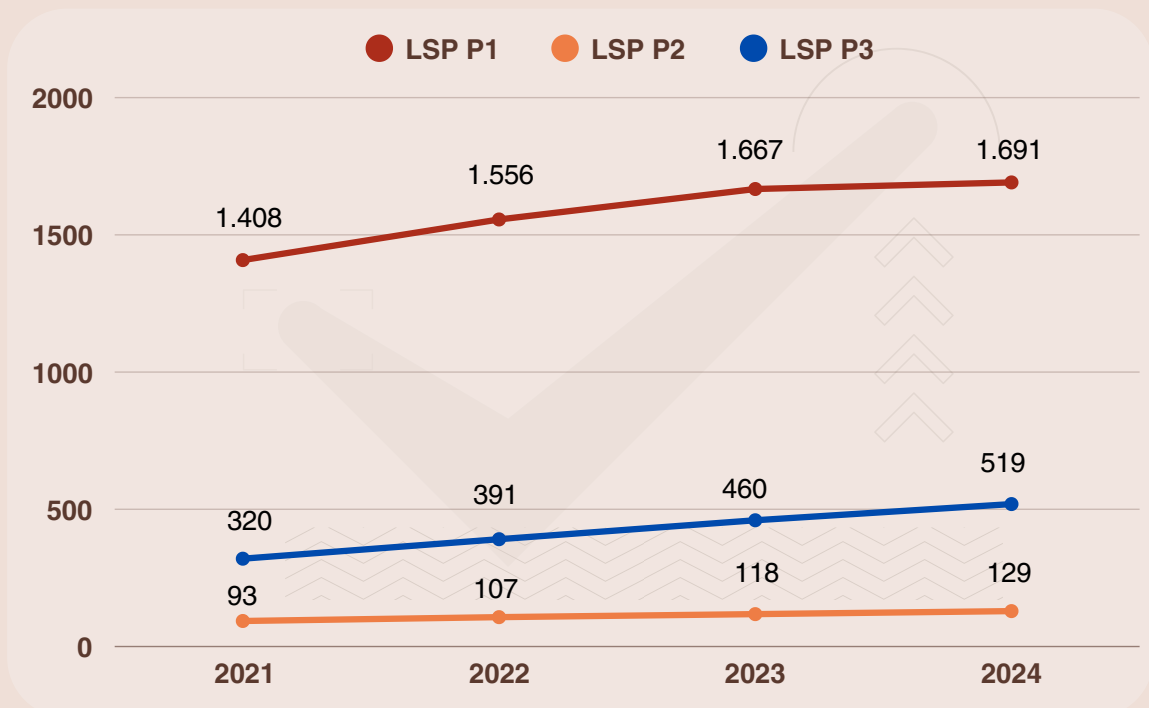


B. Penguatan LSP dan Skema Sertifikasi

Pada tahun 2024, kinerja bidang lisensi menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan lembaga sertifikasi profesi (LSP), ekspansi skema kompetensi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, serta peningkatan kualitas pelatihan dan lokakarya. Berbagai kegiatan pendukung juga terus dikembangkan untuk memastikan standar sertifikasi kompetensi yang lebih relevan dan selaras dengan transformasi digital serta dinamika pasar tenaga kerja.

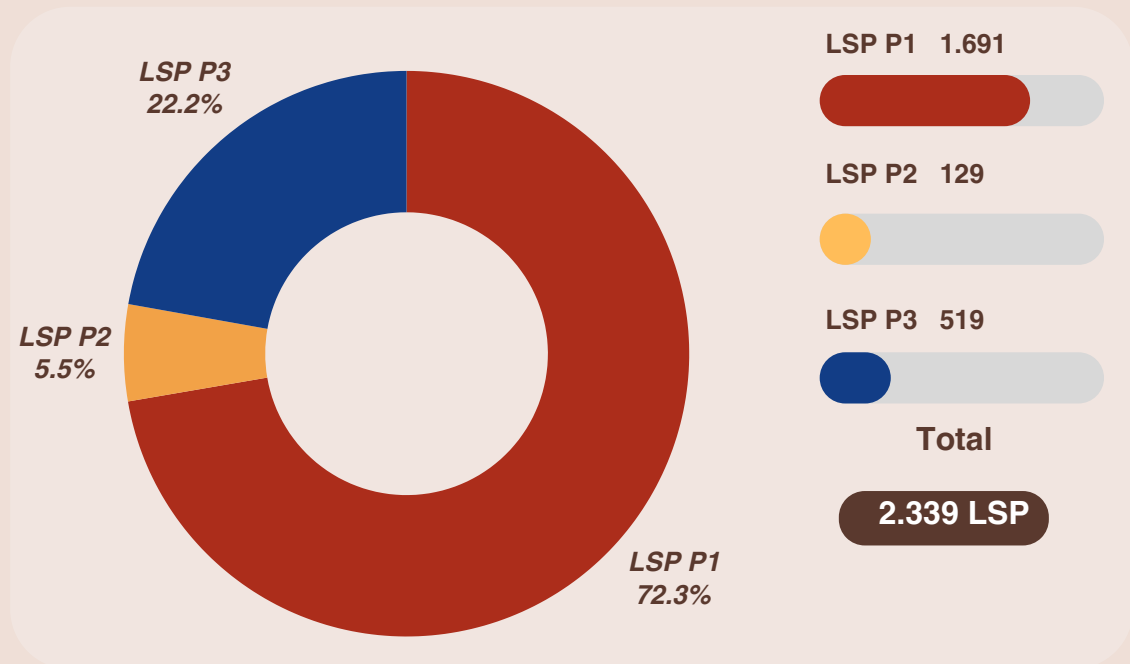
1. Perkembangan LSP Terlisensi

Pada kurun waktu 2021 hingga 2024, jumlah LSP terlisensi mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan komitmen BNSP dalam memperkuat standar kompetensi tenaga kerja. Dari total 1.821 LSP pada 2021, jumlah ini terus bertambah menjadi 2.054 pada 2022, 2.245 pada 2023, dan mencapai 2.339 pada 2024. Pertumbuhan terbesar terjadi pada LSP P3 yang menandakan adanya peningkatan peran sektor independen dalam pengelolaan sertifikasi. Peningkatan jumlah LSP ini didorong oleh digitalisasi sistem sertifikasi, penyelarasan standar dengan kebutuhan industri global, serta kolaborasi antara dunia usaha, akademik, dan pemerintah.



Penafian (disclaimer):

Data yang digunakan ini diperoleh dari Sistem Informasi (Sisfo) BNSP. Jumlah LSP terlisensi yang dicantumkan hanya mencakup LSP yang terdaftar dalam akun Sisfo BNSP dan tidak termasuk LSP yang dibekukan. Karena itu, jumlah LSP yang tercatat adalah jumlah LSP yang aktif dan terverifikasi dalam Sisfo BNSP.



Perincian LSP terlisensi pada tahun 2024 berdasarkan jenisnya dapat dicermati sebagai berikut.

a. LSP P-1: 1.691 LSP (72,3%)

LSP P-1 merupakan lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dan memiliki cakupan terbatas dalam lingkup internal institusi terkait. Dominasi LSP P-1 dalam total lisensi yang diterbitkan menunjukkan semakin kuatnya integrasi sertifikasi kompetensi dalam ekosistem pendidikan. Hal ini mendukung kesiapan lulusan dalam menghadapi persaingan di dunia kerja dengan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

b. LSP P-2: 128 LSP (5,5%)

LSP P-2 didirikan oleh regulator atau perusahaan dengan pola subkontrak dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi tenaga kerja di sektor spesifik. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan LSP P-1, keberadaan LSP P-2 terus mengalami pertumbuhan. Hal ini menandakan peran penting LSP P-2 dalam penyediaan skema sertifikasi yang lebih terfokus bagi tenaga kerja profesional di sektor industri tertentu.

c. LSP P-3: 526 LSP (22,3%)

LSP P-3 dibentuk oleh asosiasi industri atau profesi dan beroperasi secara independen dengan cakupan sertifikasi yang lebih luas. Dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) serta mendapatkan regulasi dari kementerian atau lembaga terkait, LSP P-3 semakin dipercaya oleh dunia usaha dan industri. Peningkatan jumlah LSP P-3 menjadi indikasi semakin besarnya kebutuhan sertifikasi kompetensi yang fleksibel dan berbasis standar nasional maupun internasional.

Pertumbuhan jumlah LSP ini sejalan dengan transformasi digital yang terus digencarkan dalam sistem sertifikasi kompetensi. Digitalisasi proses sertifikasi, penguatan regulasi, serta penyesuaian skema kompetensi dengan kebutuhan industri 4.0 menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas serta kredibilitas sertifikasi kompetensi di Indonesia. Ke depan, diharapkan pengembangan jumlah LSP dapat terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan sertifikasi sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam peningkatan daya saing tenaga kerja nasional di kancah global.

a. Kegiatan Verifikasi LSP Baru

Kegiatan verifikasi LSP baru terdiri atas (1) apresiasi; (2) *full assessment*; dan (3) penyaksian uji kompetensi (*witness*). Pada tahun 2024 terdapat 202 pengajuan calon LSP (CLSP).

1) Apresiasi

Kegiatan apresiasi melibatkan 57 CLSP. Apresiasi merupakan tahap konfirmasi dari BNSP kepada CLSP. Kegiatan ini bertujuan menilai kesiapan dan komitmen pimpinan CLSP dalam mendirikan LSP, serta memastikan mereka memenuhi standar operasional yang dibutuhkan. Melalui proses ini, BNSP mendukung CLSP dalam mempersiapkan diri untuk memperoleh lisensi dan berperan dalam meningkatkan kualitas sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

2) *Full Assessment* (FA)

Salah satu agenda dari pengembangan skema dan penambahan ruang lingkup adalah kegiatan asesmen penuh (*full assessment*) yang dilakukan BNSP untuk memastikan setiap LSP memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses *full assessment* menjadi tahap penting bagi 145 LSP pada tahun 2024 dalam memastikan kesesuaiannya dengan standar BNSP.



Gambar 9 Kegiatan Asesmen Penuh (FA)

Melalui asesmen ini, perangkat asesmen, prinsip-prinsip penilaian, serta jenis bukti yang diajukan asesmen diuji agar tetap valid, autentik, dan relevan dengan perkembangan industri. Selain itu, evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, persyaratan administratif, serta legalitas agar memenuhi seluruh pedoman dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya jumlah LSP yang mengikuti asesmen penuh, sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia diharapkan semakin kredibel dan adaptif terhadap tuntutan global.

3) Penyaksian Uji (*Witness*)



Gambar 10 Kegiatan Penyaksian Uji

Sebanyak 125 LSP menjalani proses penyaksian uji (*witness*) pada tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi kualitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan proses uji kompetensi yang diselenggarakan LSP sesuai dengan standar yang ditetapkan BNSP, meliputi validitas metode asesmen, objektivitas penguji, dan kelengkapan bukti kompetensi yang diajukan oleh asesi. Melalui penyaksian uji ini, BNSP dapat menjamin pelaksanaan sertifikasi berjalan transparan, kredibel, dan selaras dengan kebutuhan industri sehingga lulusan sertifikasi memiliki kompetensi yang dapat diandalkan di dunia kerja.

b. Relisensi LSP

Tercatat 305 LSP mengajukan perpanjangan lisensi (relisensi) sebagai bagian dari upaya mempertahankan legalitas dan kredibilitasnya. Kegiatan relisensi ini merupakan proses penilaian yang dilakukan BNSP untuk mengevaluasi kinerja LSP selama lima tahun terakhir, mencakup kepatuhan terhadap standar, efektivitas pelaksanaan sertifikasi, serta pengelolaan administrasi dan sumber daya. Melalui relisensi, BNSP dapat memastikan bahwa LSP tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mampu menjalankan fungsi sertifikasinya dengan profesional serta berorientasi pada peningkatan mutu tenaga kerja.



Gambar 11 Kegiatan Relisensi LSP

c. Surveilans

BNSP melaksanakan surveilans terhadap 99 LSP pada tahun 2024 sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Proses ini bertujuan meninjau kelengkapan dokumen dan kepatuhan LSP terhadap standar sertifikasi yang telah ditetapkan. Hasil dari surveilans ini menjadi dasar dalam menentukan apakah lisensi suatu LSP dapat diperpanjang atau harus dicabut. Dengan adanya mekanisme ini, BNSP dapat menetapkan LSP menjalankan fungsinya secara profesional dan sesuai dengan regulasi sehingga kualitas sertifikasi kompetensi tenaga kerja tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan industri.



Gambar 12 Kegiatan Surveilans

2. Perkembangan Skema Sertifikasi

Seiring dengan pesatnya perubahan industri dan tuntutan pasar kerja, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu tenaga kerja dengan keterampilan sesuai standar yang dibutuhkan. Berbagai sektor kini semakin menyadari bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga bukti nyata atas kompetensi individu dalam bidangnya. Hal ini tecermin pada meningkatnya jumlah skema sertifikasi yang diajukan oleh LSP.

Tahun 2024, 447 LSP mengajukan skema sertifikasi dengan total 4.042 skema terverifikasi. Angka ini menunjukkan komitmen dunia usaha dan industri dalam menyesuaikan standar kompetensi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan spesifik di masing-masing bidang. Semakin luas cakupan skema sertifikasi, semakin banyak pula tenaga kerja yang memiliki akses untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Berikut adalah 10 besar LSP yang mengajukan skema sertifikasi terbanyak pada tahun 2024.

No.	Nama LSP	Skema Terverifikasi
1	LSP Hatsindo Indonesia Teknik	270
2	LSP Holding BUMN Farmasi	200
3	LSP Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	103
4	LSP Teknik Tambang Indonesia (TTI)	99
5	LSP Muhammadiyah	62
6	LSP Cohespa	38
7	LSP LPK Gabungan Ahli Manajemen Konstruksi Nasional Indonesia (LPK Gataksindo)	36
8	LSP Bumitama	34
9	LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional	33
10	LSP Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)	32

3. Program Asistensi dan Pembinaan

Bidang lisensi mengadakan beberapa program asistensi dan pembinaan, yaitu Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan, Pelatihan Auditor SMM, Pelatihan Asesor Lisensi, *Workshop* Pembentukan LSP, Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen, Bimbingan Teknis Penyusunan Skema, dan *Workshop* Pemetaan Skema.

a. Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi pengelolaan LSP, BNSP menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Kelembagaan LSP dalam tujuh angkatan selama bulan Oktober 2024. Pelatihan ini untuk membekali personel LSP dengan keterampilan manajerial dan operasional yang sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan BNSP. Dengan metode ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab, peserta mendapatkan wawasan mendalam mengenai tata kelola kelembagaan LSP agar lebih profesional dan efektif.

1) Angkatan I—III

Pelatihan angkatan I—III berlangsung serentak pada 7—11 Oktober 2024 di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, dengan masing-masing angkatan diikuti oleh 20 peserta. Narasumber utama, Prasetyo, Bonardo Tobing, Mulyanto, dan Hasnawati, memberikan pembekalan mengenai strategi pengelolaan LSP sesuai regulasi BNSP.



Gambar 13 Pelatihan Pengelolaan LSP Angkatan I

2) Angkatan IV dan V

Melanjutkan rangkaian pelatihan, angkatan IV dan V dilaksanakan pada 14—18 Oktober 2024 di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Sebanyak 40 peserta dari berbagai LSP berpartisipasi, dengan narasumber Aviana M.S. Tjokro, Slamet Riyadi Gadas, Inda Mapiliandari, dan Muhammad Najib. Fokus pelatihan pada optimalisasi tata kelola LSP dan pemenuhan persyaratan lisensi.



Gambar 14 Pelatihan Pengelolaan LSP Angkatan IV dan V

3) Angkatan VI dan VII

Pada 21—25 Oktober 2024, angkatan VI dan VII digelar di Hotel Mercure Jakarta, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dengan total 40 peserta. Berbeda dari angkatan sebelumnya, angkatan VII dikemas sebagai Bimbingan Teknis Pengelolaan LSP, dengan materi yang lebih teknis. Narasumber utama, Aviana M.S. Tjokro, Slamet Riyadi Gadas, dan Henny S. Widyanningsih, membahas aspek strategis pengelolaan LSP agar lebih profesional dan berdaya saing.



Gambar 15 Pelatihan Pengelolaan LSP Angkatan VII

b. Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu

Untuk meningkatkan kompetensi dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu LSP sesuai dengan Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PBNSP), telah diselenggarakan lima angkatan Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP.

Pada angkatan I dan II yang diselenggarakan tanggal 24—28 Juni 2024, peserta mendapatkan pengenalan prinsip dasar sistem manajemen mutu, pemahaman terhadap standar PBNSP, serta simulasi audit internal yang mencakup studi kasus dan penyusunan laporan audit. Selanjutnya, pada angkatan III dan IV yang digelar tanggal 12—16 Agustus 2024, pelatihan lebih berfokus pada pemantapan metodologi audit, praktik penyusunan dokumen audit sesuai standar, serta simulasi audit lapangan yang diikuti dengan analisis temuan dan rekomendasi perbaikan bagi LSP.



Gambar 16 Pelatihan Auditor SMM Angkatan I dan III

Rangkaian pelatihan diakhiri dengan angkatan V pada 21—25 Oktober 2024, di mana peserta mendapatkan materi terkait evaluasi implementasi audit internal, pengelolaan risiko dalam audit, dan pementapan peran auditor dalam sistem manajemen mutu. Pada tahap akhir, peserta mengikuti ujian sertifikasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalankan peran auditor secara profesional. Melalui pelatihan ini, diharapkan para auditor yang telah dilatih mampu memastikan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu di LSP dan menjalankan audit internal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Pelatihan Asesor Lisensi

Pelatihan ini bertujuan mengembangkan kompetensi asesor lisensi dalam melaksanakan asesmen serta memberikan rekomendasi lisensi dari BNSP kepada LSP, sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan BNSP. Pelatihan Asesor Lisensi diselenggarakan pada 7—11 Oktober 2024 di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata. Kegiatan ini diikuti 20 peserta yang terdiri atas perwakilan BNSP dan LSP.



Gambar 17 Pelatihan Asesor Lisensi

Selama lima hari pelatihan, peserta mendapatkan pembelajaran intensif terkait prosedur asesmen, standar lisensi, serta tata cara memberikan rekomendasi lisensi sesuai dengan kebijakan dan pedoman BNSP. Dengan adanya pelatihan ini, para asesor lisensi dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam mendukung sistem sertifikasi yang kredibel dan berkualitas.

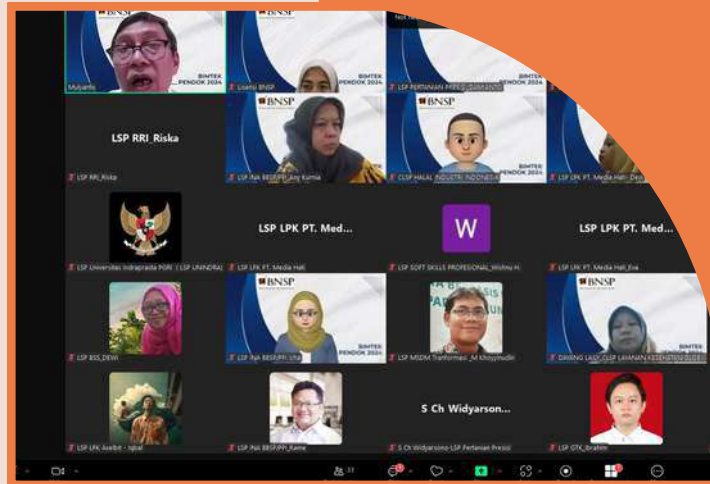
d. *Workshop Pembentukan LSP*

Pada 8—9 Desember 2024, *Workshop* Pembentukan LSP digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, dengan partisipasi 60 peserta dari Asosiasi Profesi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Acara ini menjadi wadah bagi para peserta untuk memahami tahapan dan persyaratan dalam membentuk calon lembaga sertifikasi profesi (CLSP), sekaligus membahas regulasi serta strategi pengembangan sistem sertifikasi profesi yang lebih terarah dan terstandardisasi.



Gambar 18 Pelatihan Pengelolaan LSP Angkatan IV dan V

e. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen



Gambar 19 Bimtek Penyusunan Dokumen Dilakukan secara Daring via Zoom

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen LSP diselenggarakan untuk memperkuat kapasitas calon lembaga sertifikasi profesi (CLSP) dalam menyusun dokumen sesuai dengan standar Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PBNBP). Kegiatan ini diadakan secara daring melalui *Zoom Meeting* dan dilaksanakan dalam tujuh angkatan, dengan masing-masing angkatan diikuti oleh 20 perwakilan CLSP.

Bimtek angkatan I hingga IV diselenggarakan secara paralel pada 23—24 September 2024, kemudian Angkatan V hingga VII berlangsung pada 25—26 September 2024. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan mendalam mengenai prinsip dan metode penyusunan dokumen LSP yang sesuai dengan regulasi, serta teknik penyusunan dokumen yang efektif dan terstruktur.

Dengan adanya Bimtek ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dalam menyusun dokumen LSP secara sistematis dan sesuai regulasi. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan dalam proses pembentukan serta pengelolaan LSP agar profesional dan terstandarisasi.



f. Bimbingan Teknis Penyusunan Skema

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Skema diselenggarakan dalam tujuh angkatan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 perwakilan dari calon lembaga sertifikasi profesi (CLSP) pada setiap angkataannya. Angkatan I dan II dilaksanakan pada 8—12 Juli 2024 di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, sedangkan Angkatan III dan IV berlangsung pada 7—11 Oktober 2024 di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata.



Gambar 20 Bimtek Penyusunan Skema Angkatan I

Kemudian, Angkatan V dan VI diadakan di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto pada 21—25 Oktober 2024, diikuti oleh Angkatan VII pada 11—15 November 2024. Melalui bimtek ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai standar penyusunan skema yang baik dan benar, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pelatihan ini, CLSP diharapkan mampu menyusun skema sertifikasi yang lebih terstruktur, relevan, dan berdaya saing.



g. *Workshop* Pemetaan Skema

Workshop Pemetaan Skema dilaksanakan di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata. *Workshop* ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri atas Anggota BNSP, Verifikator Skema BNSP, serta Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Sekretariat BNSP. *Workshop* ini digelar untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam proses verifikasi skema dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaksanaannya. Melalui diskusi dan analisis mendalam, peserta saling berbagi pengalaman dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk penyempurnaan sistem verifikasi skema pada masa mendatang.

C. Kolaborasi Nasional dan Internasional

Dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, BNSP terus berkomitmen untuk memperkuat sistem sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, meliputi kementerian, asosiasi profesi/industri, lembaga pendidikan, dan mitra internasional. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang terstandardisasi dan diakui secara luas sehingga mampu bersaing di pasar kerja global.

BNSP telah menandatangani sejumlah kesepakatan dengan berbagai pihak dalam rangka memperluas implementasi sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Kerja sama ini mencakup bidang kelautan dan perikanan, mekanik otomotif, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan. Selain itu, BNSP juga menjalin kemitraan dengan institusi internasional guna membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Dengan adanya kerja sama yang strategis ini, diharapkan ekosistem sertifikasi kompetensi di Indonesia semakin kuat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja dan dunia industri.

1. Kerja Sama Antar Kementerian/Lembaga

a. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

BNSP menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional pada 1 Oktober 2024. Kesepakatan ini bertujuan mendorong implementasi sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja yang berada di perusahaan-perusahaan anggota Apindo sehingga mereka memiliki standar keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.



Gambar 21 Penandatanganan MoU antara BNSP dengan Apindo

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia usaha, terutama dalam penjaminan mutu tenaga kerja yang direkrut dan dikembangkan oleh perusahaan telah memiliki kompetensi yang teruji dan tersertifikasi. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, produktivitas perusahaan dapat meningkat, efisiensi kerja dapat terjaga, dan daya saing industri di tingkat nasional maupun internasional semakin kuat. Selain itu, inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem tenaga kerja yang lebih profesional dan siap menghadapi tantangan global.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, daya saing tenaga kerja di sektor ini masih perlu diperkuat agar mampu bersaing di pasar global. Menyadari pentingnya hal tersebut, BNSP bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dalam pengembangan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan. Kesepakatan yang ditandatangani pada 20 Februari 2024 ini menjadi landasan bagi implementasi program sertifikasi yang bertujuan meningkatkan keterampilan, profesionalisme, dan produktivitas tenaga kerja di sektor ini.



Gambar 22 Penandatanganan MoU antara BNSP dengan KKP

Melalui program ini, tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan akan mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi mereka yang tidak hanya berguna di dalam negeri, tetapi juga membuka peluang kerja di tingkat internasional. Melalui standar sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri maritim global, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kerja sama ini juga mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan.



c. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)



Gambar 23 Penandatanganan MoU antara BNSP dengan Kadin

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan industri, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. BNSP dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama pada 5 Februari 2024 untuk memperluas cakupan sertifikasi kompetensi kerja yang lebih terintegrasi, guna menciptakan tenaga kerja profesional sesuai standar industri nasional dan global. Sinergi ini memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang tepat serta meningkatkan peluang karier bagi pekerja, baik di dalam maupun luar negeri.

d. Tokyo Technical College

Industri otomotif yang berkembang pesat mendorong kebutuhan akan tenaga mekanik berketerampilan tinggi. BNSP menjalin kerja sama dengan Tokyo Technical College dalam Kesepakatan Bersama pada 8 Juli 2024. Kerja sama ini untuk membangun sistem kualifikasi mekanik mobil di Indonesia dan mengembangkan program pelatihan berbasis praktik yang mengacu pada standar global. Selain meningkatkan kualitas tenaga kerja otomotif, program ini membuka peluang bagi mekanik Indonesia untuk bersaing di pasar internasional, termasuk Jepang.



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
インドネシア共和国大使館





Gambar 25 Penandatanganan MoU antara BNSP dengan Tokyo Technical College

Dengan dukungan Tokyo Technical College, pelatihan ini diharapkan mampu menjawab tantangan industri masa depan, seperti transisi ke kendaraan listrik dan sistem otomotif cerdas sehingga sektor otomotif Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.

e. Japan International Human Capital Development Organization (JIHDO)

BNSP bekerja sama dengan Japan International Human Capital Development Organization (JIHDO) melalui kesepakatan yang ditandatangani pada 12 Juli 2024 untuk meningkatkan peluang kerja tenaga kerja Indonesia di pasar internasional. Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja agar memenuhi standar industri Jepang di berbagai sektor, seperti manufaktur, kesehatan, teknologi, dan jasa. Sertifikasi yang diakui secara global memberikan keterampilan teknis dan pemahaman budaya kerja Jepang kepada tenaga kerja Indonesia. Program ini mencakup pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi sesuai kebutuhan industri Jepang, dan dukungan dalam penempatan tenaga kerja.

Gambar 26
Penandatanganan
MoU antara BNSP
dengan JIHDO





f. Liana Segrus Goes to Japan Project dan Porters Corporation



Gambar 27 Penyaksian MoU antara BNSP dengan Liana Segrus Goes to Japan Project dan Porters Corporation

Kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia terus ditingkatkan untuk memperluas akses ke pasar kerja global, salah satunya melalui partisipasi BNSP dalam penyaksian *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Liana Segrus Goes to Japan Project dan Porters Corporation pada 11 Juli 2024. MoU ini bertujuan membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor industri di Jepang dengan mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli serta memastikan tenaga kerja yang direkrut memiliki sertifikasi sesuai standar industri. Dengan pendekatan sistematis dalam mencocokkan tenaga kerja dan kebutuhan industri, kerja sama ini mempercepat penyerapan tenaga kerja Indonesia di Jepang sekaligus meningkatkan kapasitas mereka agar lebih kompetitif di lingkungan kerja internasional.



2. Kerja Sama Bilateral

Dalam usaha memperluas pengakuan kompetensi tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional, BNSP menjalin berbagai kerja sama bilateral dengan negara mitra, antara lain Taiwan, Thailand, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan. Kerja sama ini untuk memperkuat implementasi sertifikasi kompetensi, membuka peluang kerja, dan menyelaraskan standar kompetensi dengan kebutuhan industri global. Selain penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU), kerja sama ini juga mencakup observasi langsung, uji kompetensi, *capacity building*, dan diskusi strategis dengan pemangku kepentingan di negara-negara mitra.

a. Kerja Sama Bilateral dengan Taiwan

BNSP menyaksikan penandatanganan MoU antara LSP Penyelenggara Produk Halal Indonesia (PPHI) dan Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA), serta mengamati langsung uji kompetensi bagi tenaga profesional di bidang halal. Uji kompetensi ini mencakup sertifikasi auditor halal dan penyelia halal melalui metode portofolio dan wawancara. THIDA, sebagai salah satu lembaga sertifikasi halal terbaik di Taiwan, menjadi mitra strategis dalam kerja sama ini. Upaya ini dapat memperluas pengakuan kompetensi tenaga profesional Indonesia di tingkat internasional.



Gambar 28 Kerja Sama Bilateral dengan Taiwan



b. Kerja Sama Bilateral dengan Thailand

Di Thailand, delegasi BNSP berpartisipasi dalam penandatanganan MoU antara LSP PPHI dan THIDA untuk memperkuat ekosistem sertifikasi halal di Asia Tenggara. Pertemuan ini dipimpin oleh Ms. Apakorn Wongkatekorn dari Ministry of Labour of Thailand. Selain itu, diskusi bersama Asia Pacific Spa and Wellness Coalition (APSWC) yang dipimpin oleh Chairman APSWC, Mr. Andrew Jacka, membahas perkembangan industri kesehatan dan kebugaran serta tren kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi di sektor *wellness* dan *hospitality* di kawasan Asia Pasifik.



Gambar 29 Kerja Sama Bilateral dengan Thailand

Dalam kunjungannya pada Oktober, BNSP mengikuti seminar *capacity building* guna memperkuat kompetensi asesor dalam penerapan sertifikasi di industri pasar modal. BNSP juga menyampaikan materi tentang peran penting asesor kompetensi dalam menciptakan profesional keuangan yang kompeten. Selain itu, delegasi menghadiri diskusi di Bursa Efek Thailand untuk memahami regulasi pasar modal dan *best practice* yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertemuan dengan The Central Islamic Council of Thailand (CICOT) juga dilakukan guna membahas peran sertifikasi halal dalam menjamin standar halal bagi produk dan tenaga kerja di industri global.



c. Kerja Sama Bilateral dengan Jepang



Gambar 30 Kerja Sama Bilateral dengan Jepang

Di Jepang, BNSP menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan teknologi AI untuk mempercepat proses belajar bahasa Jepang bagi tenaga kerja Indonesia. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa dan kesiapan tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja Jepang.

Selain itu, kunjungan ini juga difokuskan pada pemahaman proses penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi di Jepang, termasuk bagaimana dunia usaha dan industri mendukung lembaga pendidikan serta pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi referensi bagi BNSP dalam mengembangkan kebijakan sertifikasi yang lebih selaras dengan kebutuhan industri global.

d. Kerja Sama Bilateral dengan Malaysia

Pertemuan di Malaysia berfokus pada pelaporan perkembangan proyek sertifikasi yang sedang berjalan, perencanaan proyek baru, serta review terhadap proyek-proyek sebelumnya. Salah satu agenda utama dalam diskusi ini adalah *mid-term review* pelaksanaan IMT-GT IB 2022—2024 yang bertujuan menilai efektivitas proyek-proyek yang telah dilaksanakan.



Dalam forum ini, Indonesia mengusulkan proyek Skills Recognition Processes for the Welding Manufacturing sebagai *flagship project*. Proyek ini merupakan bagian dari Mutual Recognition of Skills Process yang selaras dengan ASEAN Guiding Principles, bertujuan memperkuat kesetaraan pengakuan keterampilan tenaga kerja di kawasan ASEAN.



Gambar 31 Kerja Sama Bilateral dengan Malaysia

e. Kerja Sama Bilateral dengan Korea Selatan

BNSP menghadiri penandatanganan MoU antara LSP PPHI dan Korea Muslim Federation (KMF) yang menandai langkah maju dalam sertifikasi halal di Korea. Selain menyaksikan penandatanganan kesepakatan, delegasi BNSP juga turut mengamati proses uji kompetensi tenaga profesional di bidang produk halal. Uji kompetensi tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan bagi tenaga kerja asing di Korea Selatan.

Dalam kesempatan ini, BNSP juga melakukan pertemuan dengan Zelda Wulan Kartika (Kuasa Usaha Interim) dan Teuku Zulkaryadi (Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler) untuk membahas kerja sama lebih lanjut dalam memperkuat sertifikasi tenaga kerja di sektor industri halal Korea Selatan.



Gambar 32 Kerja Sama Bilateral dengan Korea Selatan

3. Harmonisasi Sertifikasi Kementerian/Lembaga

BNSP mengadakan kegiatan Harmonisasi Sertifikasi dengan LSP di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pada 26—27 Agustus 2024 di Hotel Gran Melia Jakarta. Acara ini diikuti 90 peserta dari Anggota BNSP, Sekretariat BNSP, dan perwakilan LSP bidang MSDM. Tujuan kegiatan ini adalah mendukung implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 115 Tahun 2022 yang mewajibkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di bidang MSDM sehingga standar sertifikasi menjadi lebih seragam, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Selama dua hari, peserta berdiskusi mengenai aspek teknis dan administratif dalam penyelenggaraan sertifikasi, termasuk penyesuaian skema sertifikasi, mekanisme asesmen, dan integrasi standar kompetensi nasional dengan industri MSDM. Forum ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarLSP. Melalui kegiatan ini, BNSP menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem sertifikasi nasional guna menciptakan tenaga kerja MSDM yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi dinamika dunia kerja.



Gambar 33 Harmonisasi Sertifikasi BNSP dengan Kementerian/Lembaga



4. Sosialisasi Program Indonesia Kompeten

a. Sosialisasi Indonesia Kompeten Menuju Indonesia Emas 2045



Gambar 34 Sosialisasi Indonesia Kompeten di Hotel Pullman

BNSP mengadakan Sosialisasi Program Indonesia Kompeten untuk membangun tenaga kerja yang kompeten menuju Indonesia Emas 2045. Pada acara ini, BNSP menyampaikan kebijakan sertifikasi kompetensi kerja dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai sistem sertifikasi BNSP. Kegiatan ini diikuti 2.060 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 412 peserta *offline* di Jakarta dan 1.648 peserta daring, serta membahas program kerja BNSP periode 2023—2028.

b. Sosialisasi Indonesia Kompeten Bidang Musik

Sosialisasi Program Indonesia Kompeten bidang musik pada 20 November 2024 di The Opus Grand Ballroom bertujuan menyosialisasikan kebijakan sertifikasi kompetensi kerja kepada *stakeholder* atau pelaku industri musik. Acara ini diikuti 120 peserta. Beberapa pelaku industri musik yang telah mengikuti sertifikasi menerima penyerahan sertifikat kompetensi musik dari LSP Musik Indonesia.



Gambar 35 Sosialisasi Indonesia Kompeten di Bidang Musik



D. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompetitif, BNSP terus berinovasi melalui digitalisasi sistem sertifikasi kompetensi. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan sertifikasi bagi tenaga kerja dari berbagai sektor. Pada tahun 2024, BNSP telah mengembangkan sistem informasi dengan fitur e-sertifikat kompetensi, integrasi dengan platform ketenagakerjaan nasional, serta perbaikan tampilan dan navigasi *website* BNSP agar lebih ramah pengguna. Langkah-langkah ini memungkinkan tenaga kerja, LSP, dan pemangku kepentingan lainnya untuk lebih mudah mengakses informasi dan layanan sertifikasi secara digital.

Selain pengembangan teknologi, BNSP juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi melalui pameran, pelatihan, serta promosi digital. BNSP berpartisipasi pada pameran di lima kota dan NakerFest 2024 untuk memperkenalkan manfaat sertifikasi kompetensi kepada masyarakat luas. Pelatihan dan sosialisasi bagi LSP juga dilakukan untuk memastikan optimalisasi penggunaan sistem informasi BNSP yang baru.

1. Pengembangan Sistem Informasi

BNSP melakukan inovasi dalam digitalisasi layanan sertifikasi untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi. Pengembangan yang dilakukan meliputi

a. Sertifikat Digital Kompetensi

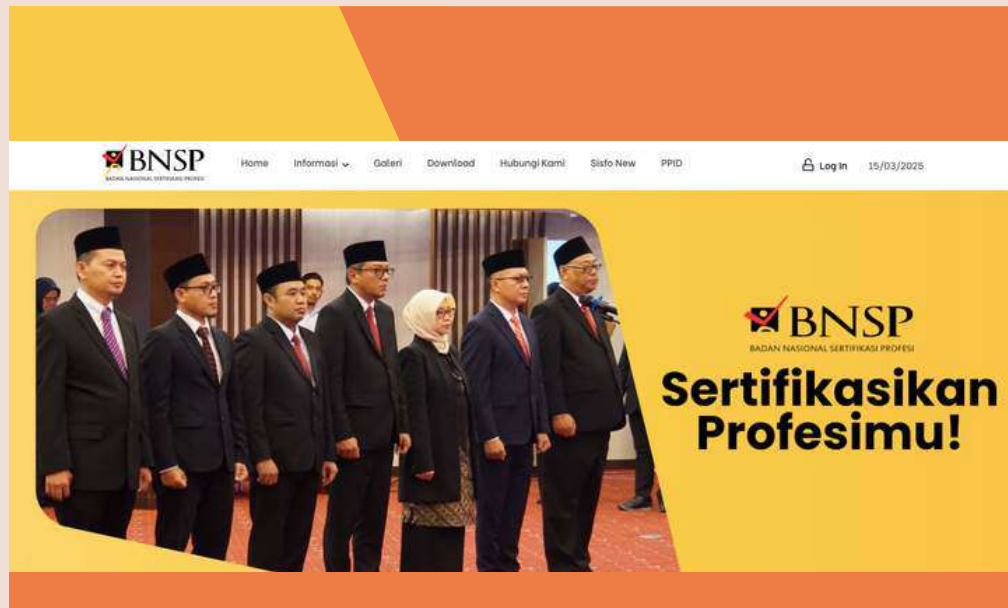
Sertifikat kini tersedia dalam format digital yang dapat diverifikasi secara langsung, memastikan keabsahan dan keamanan data.

b. Integrasi dengan SIAPkerja Kementerian Ketenagakerjaan

Mempermudah pemilik sertifikasi dalam menghubungkan kredensial mereka dengan platform ketenagakerjaan nasional untuk meningkatkan daya saing.

c. *Redesain* Website BNSP

Redesain halaman depan situs (*website*) BNSP, guna meningkatkan tampilan dan pengalaman pengguna.



Gambar 36 Situs BNSP (bns.go.id)

2. Pelatihan Pengelolaan Akun LSP

BNSP telah menyelenggarakan 43 sesi Pelatihan Pengelolaan Akun LSP. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman intensif kepada LSP mengenai cara penggunaan sistem informasi BNSP secara optimal, termasuk dalam hal manajemen data, pengelolaan akun, dan penggunaan fitur-fitur terbaru dalam sistem.



Gambar 37 Pelatihan Pengelolaan Akun LSP



3. Sosialisasi Pengelolaan Data Sistem Informasi BNSP



Gambar 38 Sosialisasi Sistem Informasi BNSP

BNSP menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan data sistem informasi dalam rangka memastikan LSP dapat memahami dan mampu memanfaatkan sistem yang diperbarui secara optimal. Kegiatan ini secara terperinci diadakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data sertifikasi, memastikan keakuratan informasi, serta memudahkan LSP dalam mengakses dan memperbarui data melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Terdapat tiga paket sosialisasi yang dilaksanakan di dua lokasi, yakni Batam dan Bekasi, dengan total peserta mencapai 300 orang. Peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fitur baru dalam sistem, tata cara validasi data, dan mekanisme integrasi dengan layanan lain yang terkait dengan sertifikasi kompetensi. Melalui kegiatan ini, BNSP berupaya melakukan penjaminan mutu LSP agar memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan sistem informasi secara efektif, mendukung transparansi, dan mempercepat proses sertifikasi di seluruh sektor industri.

Lokasi	Jumlah Paket	Total Peserta	Tanggal
Batam	1 paket x 100 orang	100 orang	20 Mei 2024
Bekasi	2 paket x 100 orang	200 orang	1 Agustus 2024

4. Pameran

BNSP melalui Bagian Data dan Informasi telah menyelenggarakan berbagai pameran. Pameran ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, baik yang mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, *fresh graduate*, dan tenaga kerja berpengalaman agar lebih memahami manfaat dari kepemilikan sertifikasi profesi.

Pada tahun 2024, BNSP telah berpartisipasi dalam lima pameran yang diselenggarakan di kota-kota besar, yaitu Palembang, Semarang, Medan, Bandung, dan Denpasar. Selain itu, BNSP turut berpartisipasi dalam NakerFest 2024 yang diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) sebagai bagian dari upaya memperkenalkan layanan sertifikasi kompetensi kepada masyarakat luas.



Gambar 39 Gerai Pameran BNSP pada NakerFest 2024

Pada setiap pameran, *booth* BNSP menyediakan beberapa layanan utama bagi pengunjung, antara lain

a. Pelayanan Informasi terkait Lisensi LSP

Memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan perolehan lisensi bagi LSP.

b. Pelayanan Validasi Profil dan Skema Sertifikasi LSP

Memungkinkan peserta melakukan pengecekan validitas profil dan skema sertifikasi yang tersedia di sistem informasi BNSP.

c. Pelayanan Informasi Sertifikasi Kompetensi, Pelatihan Asesor Kompetensi (Askom), dan RCC Askom

Menyediakan informasi lengkap mengenai prosedur sertifikasi, pelatihan asesor kompetensi, dan mekanisme *Recognition of Current Competency* bagi asesor.

5. Promosi

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi, BNSP aktif melaksanakan berbagai kegiatan promosi. Strategi promosi yang diterapkan mencakup

- a. pembuatan video profil BNSP yang menampilkan peran dan manfaat sertifikasi kompetensi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia; dan
- b. pembuatan video animasi layanan BNSP yang disajikan dalam berbagai kegiatan dan pameran untuk memberikan gambaran interaktif mengenai layanan yang disediakan oleh BNSP.



Gambar 40 Promosi BNSP di Nakerfest 2024



E. Evaluasi dan Pengawasan LSP

BNSP konsisten melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap LSP. Evaluasi ini untuk menjamin LSP dapat mematuhi standar yang ditetapkan, baik dalam proses sertifikasi, penerbitan sertifikat, maupun dalam pengelolaan administrasi dan operasionalnya. Sementara itu, pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menindaklanjuti kasus-kasus yang dapat berpengaruh terhadap keabsahan sertifikasi kompetensi.

Berbagai langkah strategis telah diterapkan, di antaranya penyusunan regulasi yang lebih ketat, advokasi terhadap pelanggaran, dan klarifikasi terhadap kasus yang berpotensi mencederaikan integritas sistem sertifikasi. Dengan pendekatan ini, BNSP berupaya menciptakan sistem sertifikasi yang semakin transparan, profesional, dan selaras dengan kebutuhan industri serta standar ketenagakerjaan nasional. Subbab ini menguraikan berbagai kebijakan dan tindakan yang telah diambil BNSP dalam memperkuat regulasi, menangani kasus-kasus pelanggaran, dan menjamin kepatuhan LSP terhadap aturan yang berlaku.

1. Penyusunan Peraturan BNSP

BNSP mengadakan dua kegiatan konsinyering. Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan dan penyempurnaan regulasi terkait proses lisensi dan relisensi LSP serta sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional.

a. Konsinyering Penyusunan Buku Saku Pengajuan Lisensi dan Relisensi

Untuk mempermudah proses pengajuan lisensi dan relisensi LSP, disusun Buku Saku Pengajuan Lisensi dan Relisensi sebagai panduan resmi yang menjelaskan prosedur, persyaratan, dan mekanisme terkait. Konsinyering penyusunan ini diikuti oleh 39 peserta, meliputi Anggota BNSP, Sekretariat BNSP, perwakilan dari Persatuan Induk Kompetensi Nusantara (PIKN), dan Kadin yang memberikan masukan strategis. Dengan buku saku ini, proses lisensi diharapkan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan standar mutu sertifikasi nasional.

b. Konsinyering Penyusunan Peraturan BNSP

Sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat regulasi di bidang sertifikasi kompetensi, BNSP juga menyelenggarakan konsinyering penyusunan Peraturan BNSP yang membahas dua rancangan peraturan, antara lain

- 1) Rancangan Peraturan BNSP tentang Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional dengan memperjelas kebijakan, mekanisme, dan implementasi sistem sertifikasi kompetensi secara nasional; dan
- 2) Rancangan Peraturan BNSP tentang Penilaian Persyaratan dan Pembentukan LSP yang mengatur kriteria dan prosedur dalam pembentukan serta evaluasi LSP agar sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan industri.



Gambar 41 Konsinyering Penyusunan Peraturan BNSP



Kegiatan ini dihadiri oleh 45 peserta yang terdiri atas Anggota BNSP, Sekretariat BNSP, dan menghadirkan master asesor/*lead* asesor lisensi BNSP sebagai narasumber utama. Forum ini menjadi wadah diskusi intensif dalam memastikan regulasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem sertifikasi kompetensi di Indonesia.

2. Advokasi

Dalam menjalankan pengawasan dan penegakan standar sertifikasi kompetensi, BNSP melakukan advokasi terhadap beberapa LSP dan lembaga pelatihan. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut ini beberapa kasus yang ditangani BNSP dalam proses klarifikasi dan evaluasi kebijakan sertifikasi.

a. Klarifikasi Sertifikat oleh LSP Informatika

BNSP meminta klarifikasi kepada LSP Informatika terkait penerbitan *Certificate of Completion* atas nama Afif Farhan Ilham untuk skema *Network Administrator* yang diterbitkan pada 29 Mei 2024. LSP Informatika menjelaskan bahwa sertifikat tersebut merupakan Surat Keterangan Lulus (SKL) sementara karena menunggu blanko sertifikat dari BNSP.

Keputusan BNSP:

BNSP menegaskan bahwa LSP tidak diperkenankan menerbitkan SKL karena tidak ada kebijakan atau SOP yang mengatur hal tersebut. LSP Informatika diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai untuk tidak menerbitkan *Certificate of Completion* lagi dan mengirimkannya ke BNSP.

b. Klarifikasi Penggunaan Logo dan Pelatihan oleh PT Anda Citra Indonesia

PT Anda Citra Indonesia yang merupakan mitra LKP Khairunnas menyampaikan klarifikasi terkait pelatihan asesor kompetensi dan penggunaan logo BNSP dalam flier promosi. Ditemukan bahwa admin PT Anda Citra Indonesia tidak memahami aturan terkait mitra LSP tidak diperbolehkan melakukan pelatihan asesor kompetensi. Kemudian, logo BNSP tidak diperbolehkan untuk digunakan tanpa dicantumkan bersama logo LSP.



Keputusan BNSP:

- 1) pencantuman logo BNSP hanya diperbolehkan jika disandingkan dengan logo LSP dan disertai keterangan bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang dinyatakan kompeten;
- 2) LSP tidak diperbolehkan menawarkan pelatihan kepada masyarakat umum, sesuai dengan Pedoman BNSP 201 Klausul 5.2.1;
- 3) mitra LSP wajib mematuhi aturan promosi dan hanya boleh membuat flier dengan izin LSP; dan
- 4) PT Anda Citra Indonesia diwajibkan membuat surat pernyataan bermeterai bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang kompeten dan mengirimkannya ke BNSP.

c. Klarifikasi Sertifikat Kompetensi LSP Crew Kapal Pesiar dan Kapal Niaga Internasional (CKPNI)

BNSP menerima surat dari Anglo-Eastern (*offshore*) pada 25 April 2024 terkait verifikasi sertifikat kompetensi atas nama Noviyadi Cahya untuk skema *Cook*, dengan nomor blanko 10617232. Namun, berdasarkan *database* BNSP, nomor tersebut tercatat atas nama Agus Sutresno, bukan Noviyadi Cahya.

LSP CKPNI mengklarifikasi bahwa Noviyadi Cahya mengikuti uji kompetensi secara mandiri dan sertifikatnya dikeluarkan menggunakan stok blanko kosong yang masih tersedia di LSP. Kemudian, blanko tersebut merupakan peninggalan Ketua LSP sebelumnya yang saat itu masih diperbolehkan oleh BNSP.

Keputusan BNSP:

- 1) LSP dilarang mencetak sertifikat menggunakan stok blanko kosong yang ada di LSP karena berisiko disalahgunakan dan dapat menimbulkan permasalahan hukum;
- 2) semua sertifikat harus diterbitkan melalui permohonan blanko resmi ke BNSP untuk memastikan validitasnya dalam *database* BNSP;



- 3) LSP CKPNI diwajibkan mengembalikan sisa blanko kosong ke BNSP dengan berkoordinasi dengan Bidang Sertifikasi dan Sekretariat BNSP;
- 4) bukti uji kompetensi Noviyadi Cahya harus diserahkan sebagai dasar jawaban atas surat Anglo-Eastern (*offshore*); dan
- 5) BNSP melakukan surveilans terhadap LSP CKPNI.



Gambar 42 Advokasi LSP Informatika dan LSP CKPNI

3. Pembekuan LSP

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018, BNSP memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada LSP dalam bentuk pembekuan atau pencabutan lisensi. Pembekuan lisensi merupakan penangguhan sementara izin operasional, sedangkan pencabutan lisensi berarti penghapusan izin secara permanen. Sanksi ini dapat dijatuhkan jika LSP terbukti tidak aktif atau menghentikan kegiatan sertifikasi, serta apabila ditemukan pelanggaran berat yang bertentangan dengan Peraturan Kepala BNSP.



Pada tahun 2024, BNSP membekukan lisensi tujuh LSP sebagai bagian dari langkah penegakan standar sertifikasi kompetensi. Pembekuan ini diberikan dengan durasi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing LSP.

- 1) LSP Ataknas Profesional Konstruksi menerima pembekuan lisensi selama 1 (satu) tahun sejak 21 November 2024. LSP ini berasal dari sektor konstruksi dan dikenai sanksi karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan BNSP.
- 2) LSP SMKN 1 Singaraja dijatuhi pembekuan selama 3 (tiga) bulan, mulai 21 November 2024 akibat kesalahan pencetakan sertifikat. Kesalahan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses sertifikasi dan keabsahan dokumen kompetensi yang diterbitkan.
- 3) LSP SMK Ar-Rizqi Bina Insani juga mengalami pembekuan lisensi selama 3 bulan, terhitung sejak 21 November 2024 karena kasus yang sama, yaitu kesalahan dalam pencetakan sertifikat.
- 4) LSP SMK Ekonomika Depok mendapat pembekuan lisensi, yaitu 1 (satu) tahun mulai 21 November 2024, juga akibat kesalahan dalam pencetakan sertifikat. Durasi pembekuan yang lebih panjang menunjukkan bahwa kasus yang terjadi memiliki dampak administratif yang lebih serius.
- 5) LSP Ataki Konstruksi Indonesia dari sektor konstruksi mengalami pembekuan selama 1 tahun 6 bulan, mulai 6 Desember 2024. Pembekuan dengan durasi panjang ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi cukup berat dan membutuhkan perbaikan signifikan sebelum lisensinya dapat dipulihkan.
- 6) LSP Hatsindo Indonesia Teknik juga berasal dari sektor konstruksi dan dikenai pembekuan lisensi selama 6 bulan, sejak 6 Desember 2024.
- 7) LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional yang bergerak di bidang konstruksi, mendapatkan pembekuan dengan durasi 1 tahun 6 bulan, mulai 31 Desember 2024.

Pembekuan lisensi ini memberikan peringatan dan kesempatan bagi LSP terkait agar memperbaiki kesalahan serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen BNSP dalam menjaga kredibilitas sertifikasi kompetensi di Indonesia agar LSP dapat memenuhi standar profesionalisme dan integritas dalam menjalankan fungsi sertifikasinya.

BNSP Raih Peringkat II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

BNSP meraih peringkat kedua dalam kategori Lembaga Nonstruktural pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang berkomitmen menjalankan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BNSP memperoleh nilai 97,4, menempatkannya di posisi kedua setelah Badan Pengawas Pemilu (98,43), dan di atas Badan Amil Zakat Nasional (97,38).

Penilaian ini didasarkan pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang mencakup e-monev dan Uji Publik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNSP terus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola layanan sertifikasi yang lebih terbuka dan akuntabel.



Gambar 43 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 untuk BNSP



Bab 4

Analisis Tantangan dan Solusi



A. Tantangan dalam Pelaksanaan Sertifikasi

Beberapa tantangan yang masih menjadi perhatian adalah kesenjangan antara jumlah tenaga kerja tersertifikasi dengan kebutuhan industri, keterbatasan akses sertifikasi di daerah tertentu, serta perlunya sistem sertifikasi yang lebih adaptif dan *real-time*. Untuk mengatasi tantangan ini, BNSP terus mendorong percepatan digitalisasi, memperkuat kerja sama dengan sektor industri, serta meningkatkan peran LSP dalam memperluas cakupan sertifikasi agar lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

1. Disrupsi Teknologi dan Kebutuhan Digitalisasi

Perkembangan teknologi yang pesat menuntut sistem sertifikasi yang lebih adaptif dan terintegrasi secara digital. Saat ini, proses sertifikasi masih menghadapi kendala dalam implementasi digitalisasi secara menyeluruh, khususnya dalam pengembangan sistem yang *real-time* dan berbasis data yang terintegrasi. Sertifikasi berbasis digital yang mencakup pengujian daring, verifikasi, dan penyimpanan sertifikat elektronik perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

2. Kesenjangan Antara Tenaga Kerja Tersertifikasi dan Kebutuhan Industri

Terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi dengan kebutuhan industri di berbagai sektor. Industri sering kali membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema sertifikasi yang ada. Hal ini mengakibatkan tenaga kerja tersertifikasi belum sepenuhnya terserap oleh industri. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang lebih erat antara BNSP, LSP, dan sektor industri agar sertifikasi dapat lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Harmonisasi Standar Sertifikasi dengan Pasar Global

Standar kompetensi nasional yang diterapkan melalui sertifikasi perlu selaras dengan standar internasional agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global. Namun, masih terdapat perbedaan dalam sistem dan pengakuan sertifikasi antarnegara yang berpotensi membatasi mobilitas tenaga kerja tersertifikasi ke luar negeri. Karena itu, kerja sama internasional harus diperluas, baik melalui pengakuan sertifikasi lintas negara maupun harmonisasi standar kompetensi yang sesuai dengan regulasi global.

4. Aksesibilitas Sertifikasi di Daerah dan Sektor Tertentu

Pemerataan akses terhadap sertifikasi masih menjadi tantangan, khususnya di daerah dan sektor-sektor industri yang belum memiliki cukup banyak LSP. Tidak semua tenaga kerja memiliki akses yang mudah terhadap program sertifikasi akibat keterbatasan fasilitas, biaya, atau ketersediaan asesor yang kompeten. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan peningkatan jumlah LSP di daerah yang masih kurang terjangkau serta penyediaan skema sertifikasi yang lebih fleksibel, termasuk melalui program sertifikasi berbasis teknologi yang dapat diakses dari berbagai lokasi.

5. Peningkatan Efisiensi dan Pengawasan dalam Proses Sertifikasi

Sistem sertifikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja tersertifikasi, tetapi juga pada efisiensi dan kredibilitas prosesnya. Beberapa tantangan yang masih ditemukan, antara lain proses sertifikasi yang masih memerlukan waktu yang cukup panjang, serta pengawasan terhadap LSP yang harus terus diperketat guna memastikan standar kompetensi tetap terjaga. BNSP telah melakukan berbagai langkah pengawasan, seperti asesmen penuh, *witness* uji, dan surveilans, tetapi upaya ini masih perlu diperkuat dengan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan LSP menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.

B. Rekomendasi Peningkatan Mutu

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi, peningkatan mutu sertifikasi menjadi aspek krusial yang perlu diperkuat oleh BNSP. Peningkatan mutu ini bertujuan memastikan bahwa sertifikasi kompetensi bukan hanya diakui secara nasional, melainkan juga relevan dengan kebutuhan industri dan standar global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa strategi yang terarah dan berkelanjutan, meliputi penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas asesmen, harmonisasi dengan standar internasional, serta optimalisasi peran LSP dan asesor.

1. Digitalisasi Proses Sertifikasi untuk Transparansi dan Efisiensi

Transformasi digital merupakan langkah dalam meningkatkan mutu sertifikasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses sertifikasi dapat lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Beberapa langkah digitalisasi yang dapat dilakukan, antara lain

a. Pengembangan Sistem Sertifikasi Berbasis Digital

Implementasi platform digital terintegrasi yang memungkinkan pendaftaran, asesmen, dan penerbitan sertifikat dilakukan secara daring akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi tenaga kerja. Sertifikasi elektronik (*e-certificate*) juga dapat digunakan untuk mempermudah verifikasi dan validasi dokumen sertifikasi.

b. Pemanfaatan *Blockchain* untuk Keamanan dan Validitas Sertifikasi

Teknologi *blockchain* dapat diterapkan untuk menjaga keamanan data sertifikasi, mencegah pemalsuan sertifikat, dan memungkinkan akses yang lebih luas bagi perusahaan dalam melakukan verifikasi tenaga kerja tersertifikasi.

c. Penguatan Sistem Manajemen Data Sertifikasi

Integrasi sistem informasi BNSP dengan LSP dan instansi terkait akan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses terhadap data tenaga kerja tersertifikasi sehingga industri dapat lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Harmonisasi Standar Sertifikasi dengan Pasar Global

Sistem sertifikasi harus dapat diakui secara global agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing di tingkat internasional. Untuk itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan, meliputi

a. Kerja Sama dengan Organisasi Sertifikasi Internasional

BNSP perlu menjalin kemitraan dengan lembaga sertifikasi internasional, seperti ISO (International Organization for Standardization), ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), dan organisasi terkait lainnya untuk memastikan sertifikasi yang dikeluarkan dapat diakui di berbagai negara.

b. Penerapan *Mutual Recognition Agreement* (MRA)

Kesepakatan pengakuan sertifikasi lintas negara atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA) harus diperluas, terutama di sektor yang banyak membutuhkan tenaga kerja internasional, seperti perhotelan, manufaktur, dan teknologi informasi.

c. Adaptasi Standar Internasional dalam Sertifikasi Nasional

Dengan mengadopsi standar kompetensi internasional, tenaga kerja Indonesia akan lebih mudah bersaing di pasar kerja global. Standar yang digunakan harus mencakup aspek keterampilan teknis, *soft skills*, dan etika profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri global.

3. Optimalisasi Peran LSP dan Pemerataan Akses Sertifikasi

Untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh sertifikasi, peran LSP perlu diperkuat dan diperluas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain

a. Perluasan Jangkauan LSP ke Daerah dan Sektor Kurang Terjangkau

BNSP perlu memberikan insentif bagi LSP yang beroperasi di daerah dengan akses terbatas serta mendorong pengembangan skema sertifikasi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai wilayah.

b. Penguatan Pengawasan dan Akreditasi LSP

Mekanisme audit dan pemantauan berkala terhadap LSP harus diperketat agar kualitas sertifikasi tetap terjaga. LSP yang tidak memenuhi standar harus diberikan sanksi tegas, sedangkan yang berprestasi diberikan apresiasi atau insentif guna meningkatkan kualitas layanan mereka.

c. Penyederhanaan Proses Sertifikasi agar Lebih Aksesibel

BNSP dapat melakukan reformasi birokrasi dalam prosedur sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh tenaga kerja dari berbagai latar belakang. Pengurangan proses administratif yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas asesmen akan mempercepat layanan sertifikasi.

4. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Dalam upaya menjaga sistem sertifikasi tetap sesuai dengan perkembangan industri dan memiliki kualitas terstandarisasi, dibutuhkan mekanisme penguatan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

a. Penerapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Data

Menggunakan teknologi *big data* dan AI untuk menganalisis efektivitas sistem sertifikasi dan memberikan rekomendasi perbaikan berbasis data nyata dari dunia industri.

b. Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Sertifikasi

Evaluasi kepuasan tenaga kerja dan industri terhadap layanan sertifikasi harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Survei dan forum diskusi dengan industri serta tenaga kerja dapat menjadi cara efektif untuk mengumpulkan masukan yang relevan.



Bab 5

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis



Laporan Kinerja BNSP Tahun 2024 dengan tema "Mewujudkan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang Kredibel dan Berdaya Saing Global" mencerminkan komitmen BNSP dalam membangun ekosistem sertifikasi yang semakin kuat dan relevan dengan kebutuhan industri. Berbagai pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2024 menunjukkan sistem sertifikasi di Indonesia terus berkembang, memberikan pengakuan kompetensi yang lebih luas bagi tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan pasar global. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang tersertifikasi, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, menjadi semakin besar.

Meskipun telah mencapai banyak kemajuan, BNSP menyadari bahwa tantangan pada masa depan tetap harus diantisipasi dengan inovasi yang lebih progresif. Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut sistem sertifikasi yang lebih adaptif dan berbasis digital, sedangkan kebutuhan industri yang terus berkembang memerlukan penyelarasan standar kompetensi yang lebih dinamis. Sebab itu, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti kementerian, asosiasi industri, serta lembaga sertifikasi internasional, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem sertifikasi di Indonesia tetap relevan dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, penguatan regulasi juga harus terus dilakukan agar proses sertifikasi berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel, serta mampu menjangkau lebih banyak tenaga kerja di berbagai sektor dan wilayah.

Keberlanjutan program sertifikasi yang kredibel akan menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi persaingan global. Karena itu, rekomendasi strategis BNSP, antara lain mendorong digitalisasi dalam sistem sertifikasi, meningkatkan efisiensi prosedur sertifikasi, serta memperluas akses bagi tenaga kerja yang berada di daerah atau sektor-sektor yang masih kurang terjangkau. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, sistem sertifikasi dapat menjadi lebih fleksibel, cepat, dan transparan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang dapat memperoleh sertifikasi sesuai dengan bidang keahliannya. Melalui langkah-langkah strategis ini, BNSP optimis bahwa sertifikasi kompetensi kerja akan semakin diakui, baik sebagai standar kualitas tenaga kerja di dalam negeri, maupun sebagai modal utama bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing pada era digital.